

**SINERGITAS KEGIATAN PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
(Studi Kasus Kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan
Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat
di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

SRI MAULIDAR

NIM. 150802018

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Administrasi Negara**

Diajukan Oleh:

SRI MAULIDAR

NIM: 150802018

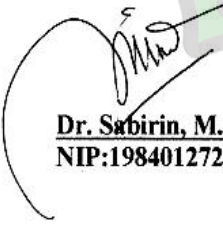
**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara**


Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

AR - RANIRY

Pembimbing II,


Dr. Sabirin, M.Si
NIP:198401272011011008


Muazzinah, B.Sc.,MPA
NIP:198411252019032012

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara**

Diajukan Oleh:

SRI MAULIDAR

150802018

Pada Hari/Tanggal

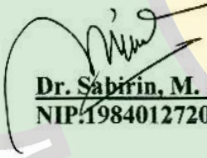
Senin, 15 Juli 2019 M
12 Dzulkaidah 1440 H

Di

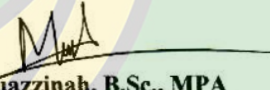
Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

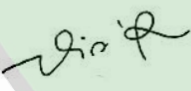
Ketua,


Dr. Sabirin, M. Si
NIP.198401272011011008


Sekretaris,


Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP.198411252019032012

Penguji I,


Dian Rubianty, SE., AK., MPA
NIDN.2017127403

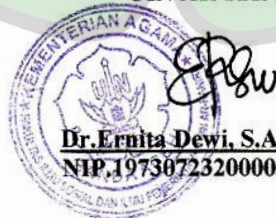
Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIDN.2019119001

AR - RANIRY

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-RANIRY**



SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Maulidar
Nim : 150802018
Program studi : Ilmu Adminitrasi Negara
Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh peneulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan di tandatangani dengan keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Banda Aceh, 15 Juli 2019

Yang menyatakan



Sri Maulidar
Nim. 150802018

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sinergitas Kegiatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Studi Kasus kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar”. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah berhasil membawa umat manusia dari lembah kebodohan atau kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu beban studi atau sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh sebab itu, semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terkait yang membutuhkan data hasil penelitian ini.

Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan perlu adanya kritik, masukan dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dikemudian hari. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Raden Zikri dan ibunda Ruslina tercinta, sungguh ananda tidak akan dapat membalas semua jasa selama ini. Lantunan doa semoga sedikit banyak bisa menjadi tanda bakti hamba kepada keduanya. Terimakasih juga untuk abang tercinta Akhrizal beserta adik-adik tercinta Asrul Nazar, Muhammad Khalis, dan Adila Nisa Ardani yang selalu bertanya kapan wisuda sehingga penulis menjadi termotivasi untuk mengerjakan skripsi dengan segera.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Reza Idria, S.H.I., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Sabirin, M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan segenap waktu, arahan, dan kesabaran dalam membimbing penulis. Harus penulis akui banyak sekali ilmu yang penulis dapatkan selama bimbingan dengan Bapak Dr. Sabirin, M.Si dan Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA.
6. Terima kasih kepada Ibu Dian Rubianty, SE., AK., MPA. dan Bapak Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si selaku dosen penguji I dan Penguji II yang telah mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk selesainya skripsi ini.
7. Terimakasih kepada seluruh dosen FISIP lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
8. Terimakasih kepada seluruh staf akademik yang telah membantu penulis dalam pembuatan surat dan segala keperluan agar skripsi dapat diselesaikan.
9. Teman-teman seperjuangan untuk meraih gelar S.AP, Alya Tahira Nabilla, Badratul Nafis, Fatmawati, Nurul Aiya, Jahratul Idami, Sri Ayu Pratiwi, Amelia Sabrina, dan seluruh angkatan 2015 yang telah menyemangati penulis selama ini. Semoga kita bisa segera memakai toga.
10. Informan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan. Terimakasih atas keramahan dan ketulusannya.
11. Terima Kasih kepada sahabat terspesial Kak Nafis, Linda dan Risqa yang telah memberikan semangat dan bantuannya hingga skripsi ini selesai.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan bagi penulis sendiri. Demikian yang dapat penulis sampaikan dan atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih. *Wallahua 'lam bi al-shawab.*

Banda Aceh, 15 Juli 2019
Penulis,

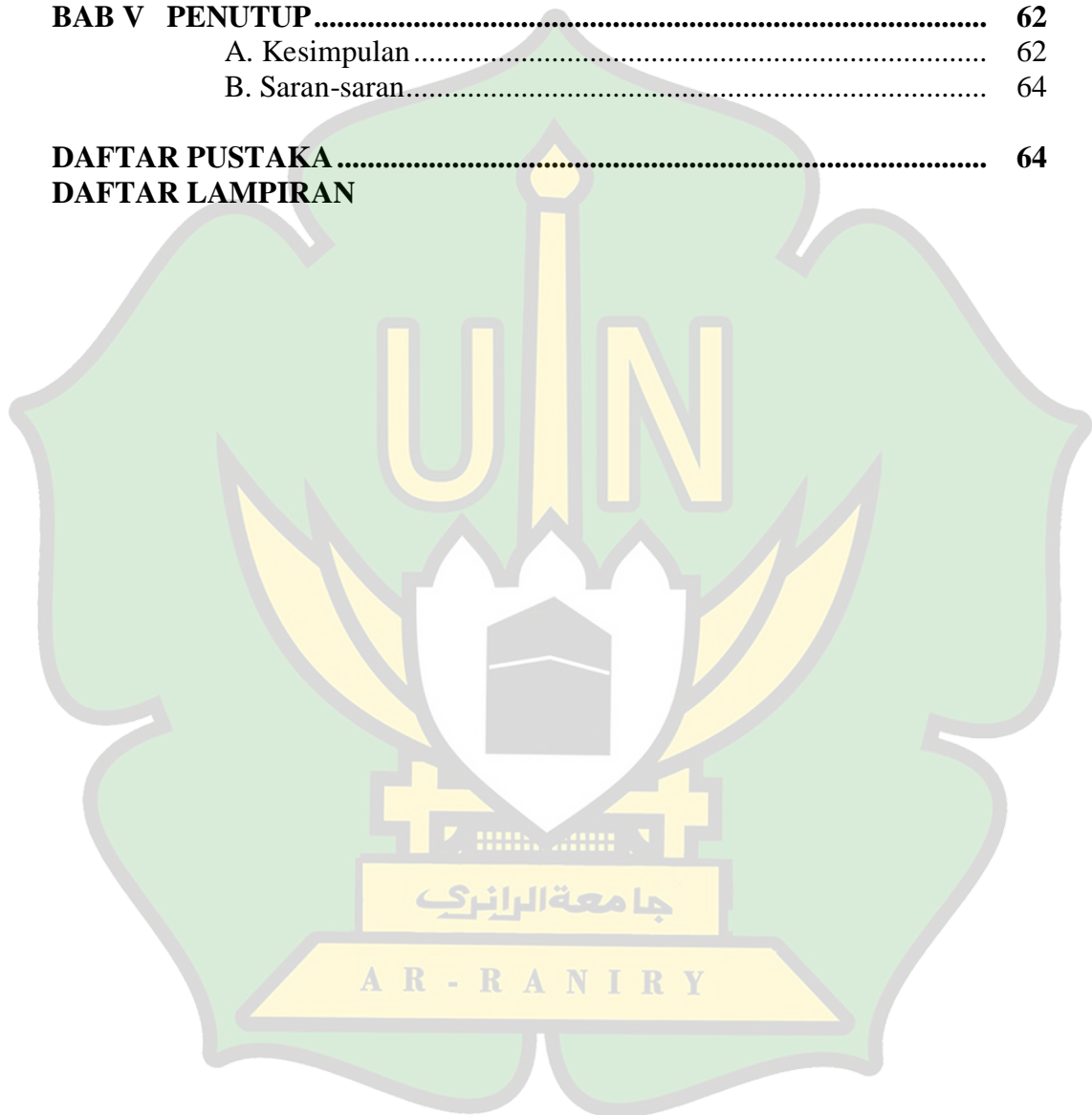
Sri Maulidar



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu	9
BAB II KAJIAN TEORITIS	16
A. Sinergitas	16
B. Kesejahteraan Sosial.....	21
C. Prinsip-Prinsip Dasar dan Tujuan Puspelkessos.....	25
D. Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	28
E. PKH (Program Keluarga Harapan).....	32
F. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	36
D. Informan Penelitian	36
E. Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Visi dan Misi Puspelkessos	42
C. Struktur Puspelkessos	43
D. Tugas dan Fungsi Puspelkessos.....	44
E. Sinergitas Puspelkessos khususnya kegiatan TKSK dan	

PKH dalam pemberdayaan masyarakat.....	46
F. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sinergitas Puspelkessos khususnya kegiatan TKSK dan PKH dalam Pemberdayaan Masyarakat	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I Data Petugas di Kantor Puspelkessos Kecamatan Indrapuri	44
Tabel II Data Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan	47



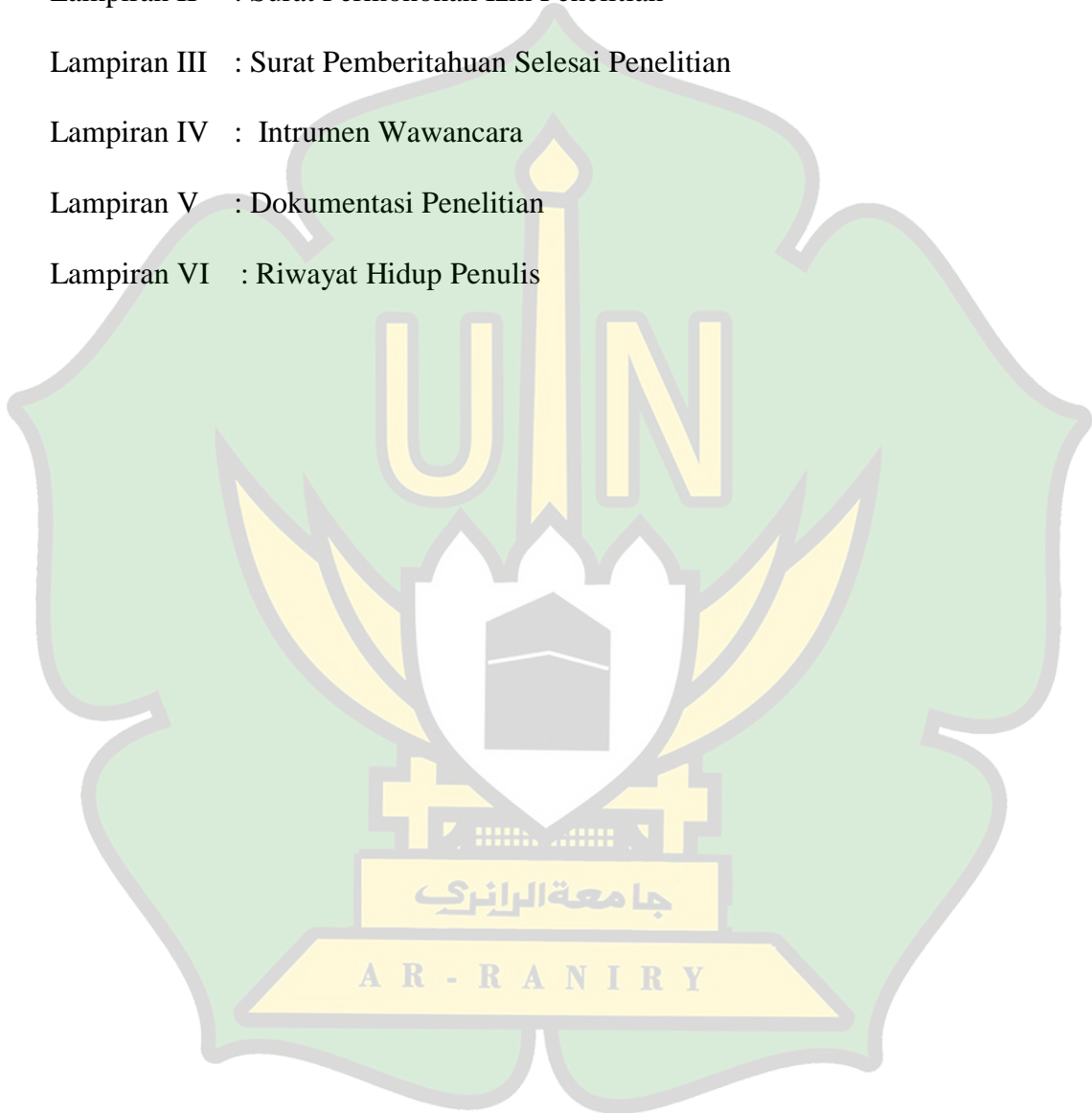
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Berpikir 33



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran III : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian
- Lampiran IV : Intrumen Wawancara
- Lampiran V : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VI : Riwayat Hidup Penulis



ABSTRAK

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos) merupakan lembaga kesejahteraan berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat di tingkat kecamatan. Puspelkessos terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sinergitas kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat sinergitas kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun sinergitas yang dilihat dalam penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan TKSK dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan TKSK maupun Pendamping PKH di Kecamatan Indrapuri selama ini sudah bersinergi. TKSK dan Pendamping PKH saling kerjasama dan membantu satu sama lain, terutama dilihat dari proses kerjasama dalam bimbingan atau pengarahan, kerjasama dalam pendataan dan kerjasama dalam pembantuan. Adapun faktor pendukung terjalannya kerjasama tersebut adalah adanya fasilitas kerja seperti komputer, kantor, dan alat berkomunikasi (*Handphone*). Sedangkan faktor penghambat terjalannya kerjasama yaitu tidak memiliki kendaraan yang cukup bagi Pendamping PKH sehingga para pendamping kebanyakan menggunakan kendaraan milik keluarganya, jika mendapat tugas mendadak. Bahkan terkadang mereka terpaksa meminjam kendaraan tetangga. Faktor penghambat yang lain adalah tidak ada laptop yang diberikan khusus bagi Pendamping PKH, ketika mereka melakukan bimbingan ke lapangan. Akibatnya penyelesaian penulisan laporan kegiatan tersebut sering tertunda, atau hanya diselesaikan oleh salah satu pendamping saja tetapi tidak bisa dibagikan ke pendamping lainnya. Artinya, tidak bisa langsung memberikan pengalaman tertulis menyangkut adanya berbagai keluhan dari masyarakat mengenai bantuan yang diberikan kepada mereka.

Kata Kunci: Puspelkessos, Kerjasama TKSK dan Pendamping PKH, dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia saat ini, diantaranya menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya angka kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup, persaingan hidup semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat untuk beradaptasi.

Strategi yang digunakan dalam pemulihan ini adalah dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya¹. Peran tenaga kesejahteraan adalah membina masyarakat agar masyarakat mandiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya yang mereka miliki semaksimal mungkin.

Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dimana telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pembangunan bidang kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui pelayanan dan

¹Imam Machali, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal PMI Media Pemikiran dan Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), Vol. VI, No. 2, hal: 156.

pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang “Kesejahteraan Sosial”. Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial difokuskan pada tujuh (7) permasalahan sosial yaitu: Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana dan Tindak Kekerasan.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan sebuah tujuan. Pemberdayaan sebuah proses adalah dimana serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan adalah proses dimana pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial itu sendiri, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan serta kemampuan dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.²

Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakikatnya dilaksanakan untuk menangani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial dengan mengedepankan inisiatif dan peran

²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal: 59-60.

aktif masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber-sumber sosial lingkungannya.

Pemerintah daerah, dengan diberlakukannya sistem desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom agar dapat mengurus daerahnya sendiri), memiliki tanggung jawab penuh dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial melalui bidang kesejahteraan sosial dengan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Sebagai konsekuensinya perlu diimbangi dengan kesiapan pelaksana, masyarakat dan para pekerja sosial yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dan peran utamanya dalam memberikan penyuluhan atau bimbingan sosial, menggerakkan dan mendampingi serta memberdayakan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.³

Di sisi lain, masalah sosial hingga saat ini masih lazim digunakan untuk menunjuk suatu masalah yang tumbuh dan atau berkembang dalam kehidupan komunitas, di mana masalah itu dianggap kurang dan bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma sosial dalam komunitas tersebut. Tumbuh dan berkembangnya suatu masalah sosial sangat tergantung pada dinamika proses perkembangan komunitas itu sendiri. Ketika suatu komunitas mengalami proses perkembangan baik karena adanya faktor-faktor dari luar komunitas, maupun karena adanya faktor-faktor dari dalam komunitas itu sendiri. Adanya proses diferensiasi struktural dan kultural, komunitas tersebut biasanya akan selalu

³Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Panduan TKSK*, (Banda Aceh: Dinas Sosial Aceh, 2008), hal: 1.

mengalami goncangan, apalagi jika faktor-faktor perubahan itu datangny sangat cepat. Dalam situasi seperti ini, tidak semua anggota komunitasny siap dalam menerima perubahan itu. Ada anggota komunitas yang sangat siap, cukup siap dan bahkan sama sekali tidak siap dalam menerima perubahan itu. Dengan adanya perbedaan dalam kesiapan menerima perubahan itulah, yang biasanya menjadi faktor pemicu tumbuh dan berkembangny suatu masalah-masalah sosial.

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau Puspelkessos yang dibentuk pada tahun 2008 merupakan lembaga penyelenggara usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Dinas Sosial Aceh dan berbasis masyarakat berkedudukan di kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat Aceh.⁴ Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial. Tentunya sudah banyak permasalahan sosial yang dapat diselesaikan di Puspelkessos, seperti permasalahan lansia, anak berhadapan dengan hukum, KDRT, kekerasan terhadap anak dan banyak lainnya. Puspelkessos lahir atas hasil kerjasama Uniceff dengan Dinas Sosial Aceh yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.⁵

Puspelkessos berperan membangun sinergitas lintas lembaga sosial, sekaligus koordinasi antar tenaga pendamping program sosial. Sebagaimana diketahui bahwa ada lima tujuan pembentukan Puspelkessos, yakni mendekatkan pelayanan sosial kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi dalam membangun kesejahteraan, menyediakan pelayanan sosial terpadu, pelayanan rujukan untuk

⁴<https://dinsos.acehprov.go.id/index.php/page/26/puspelkessos>, Diakses tanggal 31 januari 2019.

⁵<http://acehnetwork.com/berita1/Pusat-Pelayanan-Kesejahteraan-Sosial-Aceh-Dinilai-Cukup-Baik-29232>, Diakses tanggal 31 Januari 2019.

mengatasi masalah sosial, dan pelayanan sistem informasi kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah tersebut untuk diangkat menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul; “Sinergitas Kegiatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, (Studi Kasus kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)”.

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sinergitas kegiatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial khusus kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Sinergitas kegiatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial khusus kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁶<http://aceh.tribunnews.com/2015/08/13/pengurus-puspelkessos-se-banda-aceh-dikukuh>. Diakses tanggal 26 Januari 2019.

1. Untuk mengetahui sinergitas kegiatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat sinergitas kegiatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam bidang akademis maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan Akademis
 - a. Dapat memperoleh pengetahuan tentang kondisi sosial masyarakat baik terhadap peneliti maupun para pembaca.
 - b. Bagi pengembangan keilmuan, dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding maupun bahan rujukan atau dasar pijakan bagi penelitian lain.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis, dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman.
 - b. Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan di Kabupaten Aceh Besar, dengan terungkapnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan koreksi demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan

kesejahteraan daerah, serta hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi sekaligus bahan masukan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca memahami maksud penulisan ini, maka perlu memberikan definisi operasional yang terkandung dalam judul ini sekaligus penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

1. Sinergitas

Sinergitas berasal dari kata Sinergi (*synergy*) yang artinya kerjasama. Sinergi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu situasi saat entitas yang berbeda bekerja sama secara menguntungkan suatu hasil akhir. Secara sederhana sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai suatu tujuan akhir, hal tersebut berarti keseluruhan dari sinergi akan lebih besar dari penjumlahan dari masing-masing bagian. Menurut Covey dalam Sri Najiyati, sinergi merupakan kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran atau outcome (hasil) yang lebih baik atau lebih besar.⁷

Sinergi tidak sama dengan kompromi. Dalam kompromi pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerja sama. Dalam hal ini sinergi berarti saling menghargai perbedaan, ide pendapat dan bersedia saling berbagi antara satu dengan yang lain. Bersinergi tidak mementingkan diri sendiri namun berpikir menang-menang dan tidak ada yang

⁷Siti Najiyati dan Slamet Rahmat Topo Susilo, *Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri*, *Jurnal Ketransmigrasian*, Vol. 28, No. 2, 2011. Diakses pada tanggal 19 Maret 2019.

dirugikan atau merasa dirugikan. Bersinergi bertujuan memadukan bagian-bagian terpisah.

Dari penjelasan yang di atas penulis menarik kesimpulan bahwa sinergitas dapat diartikan kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya. Oleh karena itu seluruh komponen masyarakat dan pemerintah diharapkan bersinergi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos)

Puspelkessos merupakan sebuah lembaga penyelenggara usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang di bentuk oleh Dinas Sosial Aceh dan berbasis Masyarakat berkedudukan di Kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial masyarakat Aceh.⁸

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

⁸ Dinas Sosial Aceh, *Panduan Puspelkessos*, 2013, hal: 3.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang didasari oleh prinsip pemihakan kepada mereka yang lemah dan dilemahkan, agar mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah kondisi serta posisinya. Pemberdayaan dengan pengertian ini meliputi langkah perbaikan kualitas hidup rakyat, yang tidak hanya diukur dari peningkatan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga kuasa dalam pengambilan keputusan disemua tingkatan. Pemberdaayaan berarti usaha mendorong proses transformasi relasi kuasa yang timpang, menjadi relasi baru yang adil dan setara.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana penelitian awal, penelitian ini telah mengadakan penelitian kepustakaan atau membaca berbagai literatur penelitian untuk membantu pelaksanaan penelitian lapangan ini.

Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Diyah Rahayu Pratiwi, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dengan Judul “Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)”. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara pemangku kepentingan BPMKS sudah bersinergi dan sesuai dengan indicator yang digunakan. Hal ini terlihat dari adanya tujuan bersama antara Stakeholder dengan BPMKS sesuai dengan peraturan wali kota. Kemudian adanya hasil yang disepakatai bersama.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara Stakeholder dengan BPMKS sudah bersinergi.⁹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dengan judul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat *Gampong* Pande Kecamatan Kuta Raja dan *Gampong* Lampeuot Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Subjek penelitian untuk memperoleh data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemitraan Dinas Sosial Provinsi Aceh, Camat Kuta Raja dan Camat Banda Raya, TKSK Kecamatan Kuta Raja dan Banda Raya, Keuchik *Gampong* Pande dan Keuchik *Gampong* Lampeuot, dan masyarakat yang sebagai penerima manfaat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik dalam pengambilan sampel yang berdasarkan ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Keberadaan TKSK dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat merupakan suatu tanggung jawab pemerintah setempat. Adapun keberadaan (TKSK) sangat strategis dalam menyukseskan penyaluran bantuan dari pemerintah kepada keluarga miskin atau penyandang masalah kesejahteraan sosial di *Gampong* Pande Kecamatan Kuta Raja dan *Gampong* Lampeuot Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Faktor

⁹Diyah Rahayu Pratiwi, *Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelah Maret. Surakarta, 2015. Diakses tanggal 17 Juli 2019.

pendukung TKSK di Kecamatan Banda Aceh Raya dan Kuta Raja adalah adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan TKSK, adanya data yang diperlukan di setiap *Gampong*, adanya pekerja TKSK yang bekerja dengan maksimal serta perhatian pemerintah yang sangat respon terhadap program tersebut yaitu dengan diberikannya kepada masing-masing TKSK berupa kendaraan dinas dan gaji yang memadai terhadap pegawai TKSK. Sedangkan faktor penghambat adalah disebabkan oleh tenaga TKSK yang terlalu luas jangkauan kerjanya yaitu mencakup suatu Kecamatan masing-masing untuk satu orang TKSK. Demikian juga yang dirasakan oleh TKSK yang ada di Kecamatan Kuta Raja dan Kecamatan Banda Raya.”¹⁰

Penelitian yang dilakukan Mizan, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif, dimana dalam mendapatkan data peneliti turun langsung ke lapangan dengan mewawancarai dan melakukan observasi terhadap Kelompok Bangkit Bersama, Tari Sovenir, dan Barona, dengan jumlah informan 7 orang yang terdiri dari 1 orang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi melalui kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, 3 dari ketua kelompok dan 3 dari perwakilan anggota kelompok. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil dari

¹⁰Fakhruddin, *Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Fakultas Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas UIN AR-Raniry. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

Penelitian menyatakan: “Adapun pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah program KUBE FM, program ini bertujuan untuk pemberdayaan fakir miskin dengan menggunakan strategi usaha ekonomi produktif (UEP) secara berkelompok melalui bantuan modal usaha, faktor peluang dan hambatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri (*self determination*) dengan didukung oleh potensi sumberdaya alam maupun manusia. Sedangkan faktor penghambat masih ada paduan operasional program yang tidak sesuai dengan lapangan serta tidak adanya pembinaan khusus oleh pendamping untuk KBS. Secara umum peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KUBE FM masih minim dikarenakan pemberdayaan UEP secara berkelompok tidak berkelanjutan. Akan tetapi UEP dikelola dengan cara mandiri oleh masing-masing anggota.”¹¹

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Saridah, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dengan judul “Strategi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Janda Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan Trumon”. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif, di mana data yang diperoleh didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian Fokus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai strategi telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam pemberdayaan janda

¹¹Mizan, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas UIN AR-Raniry. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

rawan sosial ekonomi, seperti peningkatan kehidupan ekonomi rumah tangga melalui kegiatan jaminan sosial, bantuan modal usaha. Apabila tidak ada anggaran pemberdayaan janda rawan sosial ekonomi di dalam DIPA/RKA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, maka diusulkan melalui APBN pada Kementerian Sosial RI di Jakarta. Bantuan yang diberikan Dinas Sosial dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kepada janda rawan sosial ekonomi yang ada di kecamatan Trumon, dalam bentuk rumah layak huni, modal usaha atau KUBE-FM, mesin jahit, pakaian dan alat bantu bagi penyandang cacat serta bantuan beras miskin (Raskin). Dalam pemberdayaan janda rawan sosial ekonomi yang ada di kecamatan Trumon, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan menghadapi berbagai kendala, antara lain: Terbatasnya anggaran di dalam program pemberdayaan janda rawan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; belum sinergis perencanaan program peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan instansi terkait; kurangnya pemahaman akan pentingnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial; kurang partisipasi unsur-unsur masyarakat di dalam penanganan masalah pemberdayaan janda rawan sosial ekonomi.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Rahayu Pratiwi, yang variabel adalah Sinergitas Antar Stakeholder dalam Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). Penelitian yang dilakukan oleh Fakhrudin, yang menjadi variabelnya adalah Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial

¹²Saridah, *Strategi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Janda Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan Trumon*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas UIN AR-Raniry. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat, dan yang menjadi objek penelitiannya adalah masyarakat *Gampong* Pande Kecamatan Kuta Raja dan *Gampong* Lampeut kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh Mizan berbeda pada variabel dan objeknya, dimana yang menjadi variabel disini adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, dan yang menjadi objek penelitiannya adalah masyarakat yang mengikuti program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saridah juga berbeda pada variabel dan objeknya, di mana yang menjadi variabel adalah Strategi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Janda Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan Trumon, dan objek penelitiannya adalah janda rawan sosial ekonomi.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang sinergitas kegiatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, dalam kajian ini, peneliti akan memfokuskan terkait sinergitas kegiatan pusat pelayanan kesejahteraan sosial khususnya kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sinergitas program pusat pelayanan kesejahteraan sosial khususnya kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya masih melihat masing-masing peran lembaga

dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah dijelaskan di atas, sedangkan dalam kajian ini peneliti lebih memfokuskan pada sinergitas atau kerjasama kegiatan dalam pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat di tingkat kecamatan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial yang terpadu, pelayanan rujukan untuk kebutuhan dan pelayanan atas permasalahan kesejahteraan sosial tingkat lanjutan, serta pelayanan sistem informasi kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Tentunya dari sejumlah aspek-aspek yang disebutkan di atas, penelitian ini akan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana penulis sebutkan di atas.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Sinergitas

Sinergitas berasal dari kata Sinergi (*synergy*) yang artinya kerjasama. Sinergi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu situasi saat entitas yang berbeda bekerja sama secara menguntungkan suatu hasil akhir. Secara sederhana sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan. Menurut Covey dalam Sri Najiyati, sinergi merupakan kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran atau *outcome* (hasil) yang lebih baik atau lebih besar.¹³ Mencapai suatu tujuan akhir, hal tersebut berarti keseluruhan dari sinergi akan lebih besar dari penjumlahan dari masing-masing bagian.

Sinergi tidak sama dengan kompromi. Dalam kompromi pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerja sama. Dalam hal ini sinergi berarti saling menghargai perbedaan, ide pendapat dan bersedia saling berbagi antara satu dengan yang lain. Bersinergi tidak mementingkan diri sendiri namun berpikir menang-menang dan tidak ada yang dirugikan atau merasa dirugikan. Bersinergi bertujuan memadukan bagian-bagian terpisah.

Dari penjelasan yang di atas penulis menarik kesimpulan bahwa sinergitas dapat diartikan kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya. Oleh karena itu seluruh komponen

¹³Sri Najiyati dan Slamet Rahmat Topo Susilo, *Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri*, *Jurnal Ketransmigrasian*, Vol. 28, No. 2, 2011. Diakses pada tanggal 19 Maret 2019.

masyarakat dan pemerintah diharapkan bersinergi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

1. Indikator Sinergitas

Sinergitas merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini kerjasama merupakan hal yang sangat penting, dimana didalamnya saling menghargai perbedaan, pendapat dan saling berbagi antara satu dengan yang lain. Menurut Doctoroff untuk melihat sinergitas dalam instansi pemerintahan berdasarkan empat poin di antaranya, Komunikasi yang Efektif, Umpan Balik yang cepat, Kepercayaan dan Kreativitas.

Sedangkan Menurut Covey sinergi merupakan kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran atau *outcome* (hasil) yang lebih baik atau lebih besar. Jadi disimpulkan bahwa sinergitas adalah sesuatu aktivitas yang saling bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu hasil yang besar atau hasil yang maksimal dengan terhubungnya beberapa peran yang berbeda didalam nya.

Adapun indikator sinergi (kerjasama) di antaranya yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi yang baik itu sangat mendukung aktivitas berorganisasi. Komunikasi digunakan sebagai alat penghubung antara satuan kerja yang berbeda sehingga terciptanya keselarasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan didalam berorganisasi.

Komunikasi dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) mengertikan bahwa sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dalam berkomunikasi pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya.¹⁴

Menurut Anderson komunikasi merupakan proses dimana kita dapat memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Hal ini dapat berjalan secara dinamis, terus berubah dan berganti tergantung situasi terkait.¹⁵ Sedangkan menurut Sofyandi dan Garniwa dalam Akbar komunikasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Komunikasi yang berorientasi pada sumber yang menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimulant guna mendapatkan tanggapan.
2. Komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang, dimana sebuah kegiatan seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.¹⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain sehingga tercapai apa yang diinginkan kedua pihak tersebut.

¹⁴M. Irwanda Firmansyah, Sinergitas Kewenangan Antar BPJS Kesehatan Dengan Organisasi Profesi Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan, *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 2, Mei-Agustus 2016. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

¹⁵Edi Santoso dan Mite Setiansah, *Teori Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), hal: 5.

¹⁶Akbar Pandu Dwinugraha, *Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jurnal Publisia (Jurnal Administrasi Negara), Vol.1, No. 2 Tahun 2016. Diakses pada tanggal 19 Juli 2019.

b. Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *Coodination* yang artinya sebuah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling memberi informasi atau mengatur hal-hal tertentu. Secara normative, koordinasi merupakan sebagai kewenangan untuk menggerakkan atau menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda namun terarah pada tujuan yang direncanakan sebelumnya.

Menurut Silalahi dalam Akbar dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Manajemen* menjelaskan bahwa koordinasi merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individu dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.¹⁷ Menurut James A.F Stoner dalam Noviana koordinasi merupakan proses dimana ada pemanduan sarana dan kegiatan yang terpisah pada sebuah organisasi secara efisien. Menurut Hani Handoko dalam Noviana koordinasi merupakan suatu proses dimana saling keterkaitan dan saling menghubungkan tujuan atau kegiatan pada bagian yang terpisah dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.¹⁸

Sedangkan menurut Hasibuan mengartikan bahwa koordinasi itu terbagi atas dua jenis, dimana ada koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi Vertikal, dimana kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit. Sedangkan koordinasi Horizontal dimana saling koordinasi antara tindakan ataupun kegiatan untuk penyatuan ataupun

¹⁷Ibid.

¹⁸Noviana Wahyu Prabandary, *Koordinasi Antar Instansi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur*. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.¹⁹

Adapun tujuannya dari koordinasi adalah untuk mensinkronkan atau menselaraskan kegiatan-kegiatan agar menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Dalam berkoordinasi perlu diterapkan hubungan antara *stakeholder* terkait apakah bersifat hubungan vertikal maupun hubungan secara horizontal.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses dimana sudah ada kesepakatan bersama secara terikat dari berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda namun terarah pada tujuan yang ditetapkan bersama.

c. Kolaborasi

Kolaborasi pada hakikatnya merupakan suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin atau sulit dicapai apabila dilakukan oleh secara individu. Kolaborasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial.

Menurut Abdulsani, Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktifitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktifitas masing-masing.²⁰ Sedangkan dalam administrasi, pengertian kolaborasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan yang semuanya terarah pada

¹⁹ Ibid

²⁰ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal: 156.

pencapai tujuan.²¹ Secara filosofis, kolaborasi merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama.

Dari teori di atas dapat kita simpulkan bahwa di dalam sebuah organisasi, komunikasi sangat penting untuk berinteraksi antar sesama, baik itu atasan maupun bawahan. Begitu juga dengan koordinasi dan kolaborasi, dimana saling mengarahkan dan saling memadukan mekanisme dalam suatu kelembagaan supaya bisa menghasilkan suatu tujuan yang hendak dicapai.

B. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk menolong orang-orang yang berada di bawah tekanan sosial tertentu untuk meraih kembali keseimbangan, kepercayaan dirinya dengan menghilangkan sebab-sebabnya atau kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem tindakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi institusi-institusi sosial agar bisa diakses oleh anggota masyarakat.²²

Kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas atau kegiatan perubahan kehidupan masyarakat ke arah positif tetapi yang terorganisir yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial (hubungan), serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standard norma-norma masyarakat yang ada di lingkungan sekeliling mereka, pembangunan tersebut bukan hanya fokus pada satu dimensi (ukuran) kesejahteraan ekonomi saja, tetapi mengutamakan dimensi kemanusiaan, serta sosial budaya, masyarakat dan lingkungan alam.

²¹Hadawi Nawawi, *Adminitrasi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal: 07.

²²Mohammad Suud, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hal: 1.

Pembangunan yang terpenting bukan ide langsung dari pemerintah tetapi harus dari masyarakat yang memerlukan pembangunan dan sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat terlibat aktif dan merumuskan pembangunan apakah yang paling strategis dalam rangka memajukan penghidupan diri dan lingkungan mereka, dengan demikian pemamfaatan pembangunan program akan tepat sasaran sehingga masyarakat akan merasakan manfaat dari program tersebut serta program akan berjalan maksimal.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pembukaan pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 dimana telah mengamanatkan bahwa negara harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam Undang-undang Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa:

- a. Kesejahteraan Sosial merupakan dimana kondisi ini terpenuhi semua baik itu kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri mereka sendiri.
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah.
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

- d. Pekerja Sosial Profesional merupakan seseorang yang bekerja, baik itu di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki suatu kompetensi dan profesi dalam pekerjaan dibidang sosial.
- e. Relawan Sosial merupakan seseorang atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan yang berlatar belakang pekerjaan sosial yang bekerja sesuai dengan hari nurani ikhlas tanpa mengharapkan imbalan.
- f. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- g. Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan perkumpulan lembaga-lembaga organisasi sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.
- h. Rehabilitasi Sosial adalah dimana proses refungsionalisasi (mefungsikan kembali) serta mengembangkan dengan tujuan untuk memungkinkan seseorang untuk mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
- i. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
- j. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya.
- k. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.²³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial merupakan segala sesuatu hal atau usaha untuk mencapai suatu perubahan kehidupan kearah yang lebih positif bagi individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat yang mengalami Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan atau pencapaian kehidupan masyarakat melalui pemenuhan pendidikan, kesehatan, politik, agama, ekonomi, budaya, hukum, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan tempat usaha serta penyediaan fasilitas-fasilitas umum. Dengan terpenuhinya hal tersebut diatas maka masyarakat akan mandiri dan akan bangkit dari keterpurukan dan

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

dapat melakukan fungsi sosial seperti masyarakat normal yang lain tanpa ketergantungan hidup pada orang lain, baik bagi pemerintah, maupun kepada masyarakat disekitarnya.

Permasalahan kesos (kesejahteraan sosial) yang sedang berkembang pada saat ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum terpenuhi hak-hak atas kebutuhan dasarnya secara layak dan sebagaimana mestinya, dimana masih ada yang belum terpenuhinya atau memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya dari permasalahan tersebut, masih ada warga negara yang mengalami hambatan untuk pelaksanaan fungsi sosial sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupannya secara layak dan bermartabat. Pada dasarnya semua manusia, keluarga, komunitas dan masyarakat memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai yang dimaksud dengan kebahagiaan sosial. Kebutuhan tersebut merujuk pada kebutuhan biologis, pendidikan, kesehatan yang layak dan juga interaksi sosial yang harmonis. Akhirnya kesejahteraan sosial terjadi pada komunitas yang dapat menciptakan kesempatan sosial bagi penduduknya untuk meningkatkan dan merealisasikan potensi-potensi yang ada pada diri masyarakat tersebut.

Berdasar Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2009, dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. Berkurangnya beban keluarga, masyarakat dan atau negara dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- c. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- d. Meningkatkan ketahanan sosial bagi masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.

- e. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan kemampuan serta kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- g. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- h. Munculnya perilaku positif dan produktif dari kelompok sasaran pelayanan yang tidak saja memberi manfaat bagi dirinya sendiri tetapi juga akan memberi sumbangsih bagi kemajuan lingkungan sosialnya bahkan negara dalam cakupan yang lebih luas.

Dalam Undang-Undang di atas telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan individu, keluarga, Kelompok/organisasi, menghubungkan orang dengan sistem sumber, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga, mempertinggi kemampuan orang dalam memecahkan dan menanggulangi masalahnya, memberikan masukan atau sumbangan terhadap pembangunan dan kebijakan sosial, berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

C. Prinsip-Prinsip Dasar, dan Tujuan Puspelkessos

Puspelkessos merupakan sebuah lembaga penyelenggara usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang di bentuk oleh Dinas Sosial Aceh dan berbasis Masyarakat berkedudukan di Kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial masyarakat Aceh. Puspelkessos yang dibentuk pada tahun 2008 yang di bentuk oleh Dinas Sosial Aceh dan berbasis masyarakat

berkedudukan di kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat Aceh.

Dalam hal ini, Prinsip-Prinsip dalam pelaksanaan Puspelkessos diantaranya yaitu:

- a. Kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial.
- b. Responsif, mampu memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dengan cepat, tanggap dan akurat.
- c. Akuntabilitas, dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Transparan, memberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mengawasi kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.
- e. Partisipatif, melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- f. Kesetiakawanan, kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kepedulian sosial dan empati untuk membantu orang lain.
- g. Keberlanjutan, penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kemandirian.
- h. Kerahasiaan, penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan kerahasiaan nelayan.

Adapun tujuan dibentuknya Puspelkessos adalah sebagai berikut:

- a. Mendekatkan pelayanan sosial kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan partisipasi dalam membangun kesejahteraan.
- c. Menyediakan pelayanan sosial terpadu.
- d. Pelayanan rujukan untuk mengatasi masalah sosial, dan
- e. Pelayanan sistem informasi kesejahteraan sosial tingkat kecamatan²⁴

Adapun dalam melihat bagaimana sinergitas dalam sebuah lembaga, maka diperlukan kerjasama yang baik antara sesama petugas atau pendamping. Secara umum kegiatan kerjasama dalam Puspelkessos memiliki tiga indikator utama.

²⁴Dinas Sosial Aceh, *Panduan Puspelkessos*, 2013, hal: 5.

Ketiga indikator tersebut adalah kerjasama dalam pendampingan, kerjasama dalam pendataan, dan kerjasama dalam pembantuan.

a. Pendampingan

Menurut Deptan pendampingan merupakan proses pemberdayaan masyarakat dalam menempatkan tenaga pendamping sebagai Dinamisator, Fasilitator, dan Komunikator. Pendampingan merupakan upaya dalam mengembangkan masyarakat diberbagai faktor yang dimiliki untuk mendapatkan fasilitas yang lebih sejahtera. Pola pendampingan dalam suatu aktifitas dapat diartikan sebagai pembinaan, mengarahkan, pengajaran dalam mengembangkan potensi yang dimiliki pekerja sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.²⁵

Adapun peran pendamping sendiri pada umumnya mencakup sebagai Fasilitator, Pendidik, Perwakilan masyarakat dan Peran teknis. Kegiatan-kegiatan penting dalam melakukan pendampingan diantaranya motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri dan lain-lain sebagainya.²⁶

b. Pendataan

Pendataan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses atau cara untuk mengumpulkan data untuk memperoleh informasi atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian. Pendataan merupakan proses pencatatan informasi sesuai dengan fakta di lapangan, dengan tujuan untuk memperoleh

²⁵Nurul Hidayat, *Pendampingan Untuk Menghidupkan Keberlangsungan Petani Karet Di Desa Sungai Kuyit*, UIN Sunan Ampel. 2015 ([www://https digilib.uinsby.ac.id/2104/5/bab 2Pdf](http://www.digilib.uinsby.ac.id/2104/5/bab_2Pdf)). Diakses pada tanggal 22 Juli 2019.

²⁶Andi Nu Graha, *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi*, *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 5, No. 2, 2009. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2019.

informasi yang dapat digunakan dimasa depan. Data bisa berupa catatan, buku, atau tersimpan sebagai file dalam bentuk database.²⁷

c. Pembantuan

Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai program yang lebih efektif dan efisien. Tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah serta berkewajiban melaporkan kegiatan dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.²⁸

D. Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sebagai pilar partisipan masyarakat, artinya TKSK/TKSM menghubungkan atau menjembatani segala aspirasi masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya di bidang penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial. Tugas dan fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Melaksanakan Pemetaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di wilayah kecamatan. Melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan Sosial tentang program dan kegiatan serta prosedur mekanisme pelayanan sosial, Melakukan Pendampingan Sosial bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin, Penyandang Cacat, Anak Terlantar, serta

²⁷Hidayatulah Himawan, *Efektifitas Tata Kerja Pendataan Kepegawaian Dalam Mewujudkan Good Governance. Seminar Nasional Informatika*, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2019.

²⁸Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal: 601.

Mengembangkan jejaring Sosial dan kordinasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial maupun dalam proses memberi rujukan sosial.

Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah sebagai Koordinator, Inisiator, Motivator, Fasilitator, Katalisator dan Administrator. Koordinator sebagaimana dimaksud adalah mengkoordinir unsur-unsur masyarakat seperti: tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemerintah setempat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Inisiator adalah memprakarsai penyelenggaraan Usaha kesejahteraan sosial. Motivator adalah memberi motivasi kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial baik perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam menangani masalah sesuai dengan kemampuan sendiri. Sedangkan fungsi sebagai Fasilitator adalah menyediakan data dan informasi dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial, Katalisator adalah sebagai penghubung Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan system sumber yang ada dilingkungan dalam penyelenggaraan pelayanan usaha kesejahteraan sosial dan Administrator adalah melaksanakan urusan administrasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.

Adapun yang menjadi sasaran tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Individu, Kelompok maupun Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sesuai Undang-Undang Nomor: Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial didalam peraturan ini terdapat 29 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menjadi sasaran

garapan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TKSK yaitu:

“Keluarga Miskin, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Cacat, Anak Nakal, Pengemis, Gelandangan, Korban Penyalahgunaan Narkoba, Eks Penyakit Kronis, Anak Jalanan, Balita Terlantar, Wanita Tuna Susila, Anak Yatim/yatim piatu, Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pekerja Migran Terlantar, Masyarakat bertempat tinggal di daerah rawan bencana, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Komunitas Adat Terpencil dan Perintis, Pahlawan Kejuangan Kemerdekaan Nasional.”²⁹

Ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sangat penting, oleh karenanya peran TKSK sangat dibutuhkan, karena TKSK sebagai mitra pemerintah merupakan pekerja sosial terdepan dalam melaksanakan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Diharapkan dengan keberadaan TKSK dapat meningkatkan peran masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan, terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial di kecamatan dan dapat mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial ditingkat kecamatan.

TKSK berkedudukan di kecamatan, sedangkan mekanisme kegiatannya sebagai berikut: Camat merupakan garis koordinasi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan garis komando. Artinya TKSK dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Camat setempat. Sedangkan tugas, instruksi serta pelaporan

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota ke Dinas Sosial Provinsi dan dilanjutkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pembinaan TKSK di tingkat provinsi dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Instansi Sosial Provinsi beserta Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat. Pembinaan dimaksud berupa fasilitas dan bimbingan teknis TKSK.

Sedangkan strategi dalam meningkatkan kemampuan TKSK dalam memberi pelayanan sosial maupun pemberdayaan sosial kepada PMKS adalah meningkatkan pembinaan TKSK dengan memberikan pengetahuan tentang pemahaman PMKS beserta kriteria masing-masing PMKS, Eksistensi diri sebagai TKSK, Prosedur dan Proses kerja, penguatan sikap dan prilaku serta ketrampilan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial berupa: pemecahan masalah masyarakat, menciptakan jalur hubungan antara penyandang masalah dengan pemilik sumber, Selanjutnya menyediakan informasi mengenai akses sumber kesejahteraan sosial yang tersedia dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh manfaat dari sumber tersebut, mempermudah interaksi antara penyandang masalah dengan pemilik sumber. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta memberikan sumbangan bagi perubahan dan perbaikan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) kearah yang lebih baik di masa yang akan datang demi kesejahteraan sosial masyarakat.

E. PKH (Program Keluarga Harapan)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang diterapkan sebagai keluarga penerima manfaat dengan tujuan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.³⁰

Adapun landasan Hukum PKH yaitu:

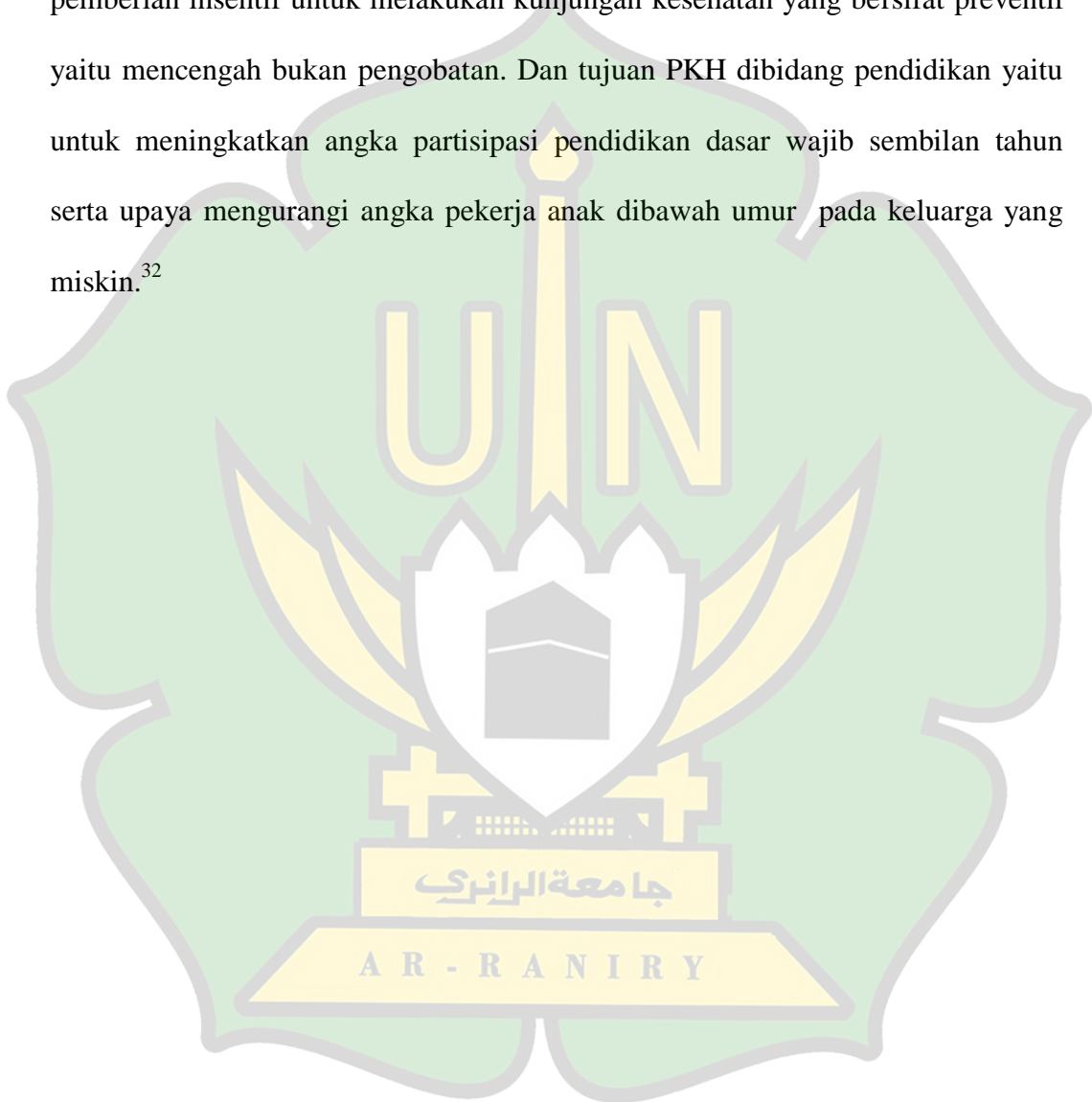
- a. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran 1 tentang penyempurnaan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- e. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transparansi panyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).³¹

Adapun tujuan dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada pokok masyarakat

³⁰<https://www.kemsos.go.id/Program-keluarga-Harapan>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

³¹Kajian Program Keluarga Harapan, oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Tahun 2015. Hal: 5.

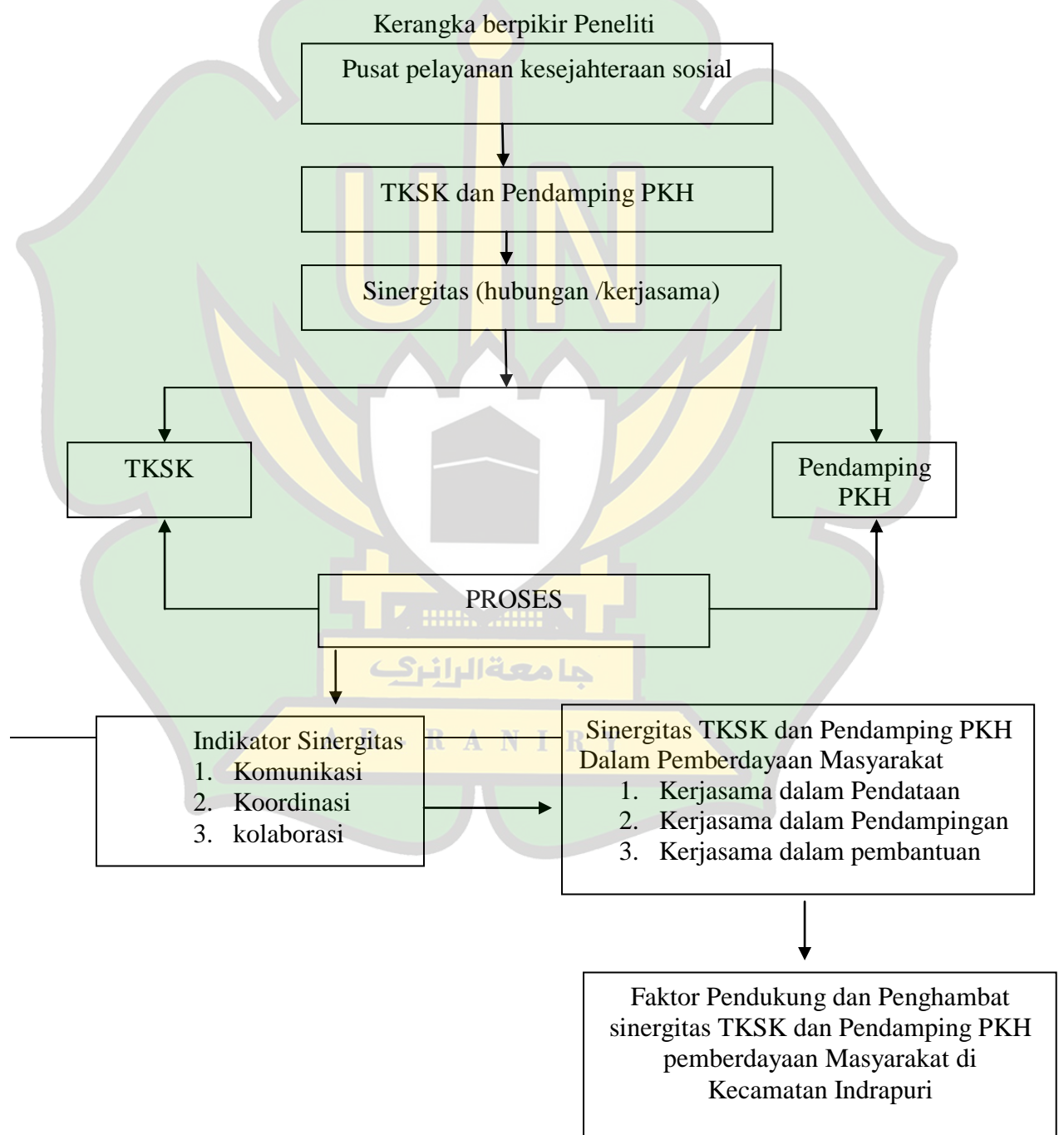
miskin. PKH sendiri fokus utamanya yaitu dibidang kesehatan dan pendidikan, tujuan utama PKH dibidang kesehatan yaitu meningkatkan status kesehatan ibu dan anak Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif yaitu mencegah bukan pengobatan. Dan tujuan PKH dibidang pendidikan yaitu untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib sembilan tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak dibawah umur pada keluarga yang miskin.³²



³²PKH Aceh Besar. Diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan inti dari teori yang telah dikembangkan yang mendasari perumusan teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan penelitian, karena dalam lapangan banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas kita teliti semua. Untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan tersebut. Membatasi penelitian merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkungannya dan batasan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti berupaya melakukan penyempitan dan penyederhanaan terhadap sarana dan riset yang terlalu luas dan rumit.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos). Mengingat luasnya jangkauan kerja dari Puspelkessos, maka penulis melakukan pembatasan penelitian yang hanya berfokus pada sinergitas kegiatan Puspelkessos khususnya kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Dan ini merupakan kecamatan yang sangat luas yang terdiri dari 3 mukim dan 52 gampong. Adapun alasan peneliti memilih memilih Kecamatan tersebut, karena Kecamatan Indrapuri merupakan salah satu Kecamatan yang maju dan yang terluas. Dan kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki lahan sawah dan kebun yang terluas dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sehingga peneliti tertarik meneliti Kecamatan Indrapuri khusus Kegiatan Kerjasama TKSK dan Pendamping PKH dalam Pemberdayaan Masyarakat.

C. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif deskripsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif, penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok.³³ Adapun penelitian lapangan ini penulis akan terjun langsung untuk memperoleh data dari berbagai sumber. Hal ini penulis lakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan, mengungkap dan menjelaskan tentang Sinergitas kegiatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat khususnya kegiatan TKSK dan Pendamping PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

D. Informan Penelitian

Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan teknik wawancara dengan berbagai responden khususnya yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Adapun informan atau sumber yang akan diwawancarai adalah sebagaimana berikut:

1. Camat
2. TKSK Kecamatan Indrapuri
3. Pendamping PKH Kecamatan Indrapuri
4. Keuchik
5. Masyarakat

³³Nana Syaodih Sukadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal: 60

E. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Secara umum, sumber data dapat dibagi 2 (dua) jenis yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan dikenal dengan data primer, sedangkan data kepustakaan dikenal dengan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi literatur di mana data yang diperoleh berasal dari sumber tertulis maupun online (skripsi, web, jurnal, *ebook*, *google book*).

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk menjelaskan fenomena dalam penelitian ini mencakup data langsung dari informan dan data pendukung (sekunder). Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti melihat dan mengamati langsung secara visual di lokasi penelitian.³⁴ Dalam hal ini, Peneliti melihat bagaimana Sinergitas Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat. Observasi juga dapat dipahami sebagai proses “pemeran serta sebagai pengamat”, artinya, peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Pada tahapan ini juga peneliti mencoba mencermati kondisi daerah penelitian supaya segala keinginan peneliti lakukan

³⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal: 75.

akan berjalan dengan sempurna.³⁵ Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan yang menjadi sampel penelitian. Ketika teknik komunikasi tidak memungkinkan, maka observasi itu sangat bermanfaat. Di samping itu juga teknik ini sekaligus dapat mengecek langsung kebenaran setiap data yang disampaikan oleh para responden ketika diskusi.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian. Mengingat penelitian dilakukan di Kecamatan Indrapuri, maka informan yang dimaksud adalah Camat, TKSK Kecamatan, Pendamping PKH Kecamatan, Keuchik, dan beberapa orang Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 13 orang sebagai informan yang terdiri dari Keuchik (3) tiga orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 1 (satu) orang, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 3 (tiga) orang dan masyarakat penerima manfaat 5 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki, dan 3 (tiga) orang perempuan yang mewakili penerima manfaat di Kecamatan Indrapuri Sehingga total semuanya berjumlah 13 orang.

Adapun alasan kenapa peneliti memilih 1 TKSK, 3 PKH, karena TKSK sendiri setiap Kecamatan satu petugasnya, sedangkan Pendamping PKH peneliti mengambil tiga orang dikarenakan mereka bertiga sudah mencakup atau mewakili semuanya data yang peneliti perlukan. Dan mereka semuanya adalah bagian dari Puspelkessos . Adapun tujuannya adalah untuk menanyakan tentang profil dan

³⁵Sugiono, *Metodologi Penelitian BISNIS*, (Bandung: Alfabeta, 1999), hal: 138-141.

hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang berdirinya Puspelkessos, serta bagaimana kerjasama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan ini. Kemudian, karena mereka juga sudah berpengalaman dan terbiasa dalam bekerjasama, sehingga apa yang ingin peneliti dapatkan bisa terjawab dengan jelas. Sedangkan camat dan keuchik mereka sebagai penghubung informasi atau koordinat untuk menjalankan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh TKSK dan Pendamping PKH. Adapun tujuan mengapa memilih informal keuchik tiga orang yang terdiri dari Keuchik Gp. Limo Blang, Keuchik Gp.Lambeutong, dan Keuchik Gp. Indrapuri dikarenakan ingin melihat perbedaan di setiap gampong tersebut. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana perbandingan antara satu gampong dengan gampong yang lainnya. Selanjutnya, Peneliti juga mewawancarai pihak Masyarakat dimana mereka adalah orang yang merasakan sendiri dampak atau manfaat dari kegiatan tersebut.

3. Dokumentasi

“Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film”³⁶Selain melalui wawancara dan observasi, data juga dapat diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi ini dapat berupa foto, video, jurnal kegiatan dan lain-lain sebagainya. Selain itu peneliti menggunakan seperangkat alat untuk merekam hasil observasi dan wawancara berupa handphone, kamera agar peneliti dapat menyimpan dan memperoleh data secara detail.

³⁶Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2008), Hal: 216.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif. Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi, dan interview, maka peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Oleh karena itu, maka dalam penelitian kualitatif ini data yang di peroleh dianalisis dengan langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah yang sesuai pa yang dikatakan Sugiyono sebagai berikut:

1. Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data-data yang telah direduksi atau dirangkum tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa dilokasi kejadian serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
2. Data display (penyajian data)
Setelah data tersebut direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat.
3. Verifikasi/ penarikan kesimpulan
Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas.³⁷

Jenis penelitian kualitatif memungkinkan analisa data dilakukan pada waktu berada di lapangan atau setelah kembali dari lapangan, analisis data pada saat pengumpulan data merupakan analisis sesudah data terkumpul seluruhnya menghasilkan temuan akhir suatu penelitian. Proses penganalisan data dimulai

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2007), hal: .92.

sejak dari pengumpulan data, yaitu dengan mengkaji data yang diperoleh dari berbagai teknik mengumpulkan data selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, proses analisa dimulai dari peristiwa-peristiwa sosial yang ditemukan dalam kajian lapangan yang tersedia dari berbagai sumber yaitu: dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen yang didapatkan selama penelitian melalui pendekatan kualitatif. Pelaksanaan analisis data atau menggabungkan dari keduanya.³⁸

Data-data hasil penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian yang dilakukan berupa uraian kalimat yang secara jelas serta logis dengan cara mengaitkan berbagai temuan data. Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara deskriptif dengan pemaparan berdasarkan temuan-temuan hasil wawancara dan observasi dengan disertai cuplikan wawancara berupa kalimat langsung disertai komentar dari peneliti berdasarkan teori yang mendukung.

³⁸Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2008), hal: 288.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaram Umum Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos)

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos) adalah lembaga kesejahteraan berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat ditingkat kecamatan dan dapat di akses oleh berbagai pihak terkait.

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos) yang dibentuk pada tahun 2008 merupakan lembaga penyelenggara usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang di bentuk oleh Dinas Sosial Aceh dan berbasis masyarakat berkedudukan di kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat Aceh.

Lahirnya Puspelkessos dilatar belakangi oleh sebuah kenyataan bahwa sesungguhnya permasalahan sosial berada pada hulu yang berbasis pada Kecamatan. Pada daerah-daerah ini pemerintah sulit menjangkau, selain karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), faktor luas dan banyaknya wilayah Kecamatan juga menjadi masalah utama. Selain itu sering sekali permasalahan sosial berawal dari masalah yang dialami oleh keluarga termaksud didalam permasalahan yang dialami oleh anak.

B. Visi Misi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos)

Adapun Visi Misi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos) di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yaitu:

1. Visi

“Profesional dalam pemenuhuna kebutuhan dan pelayanan kesejahteraan sosial, transparan dan akuntabel menjadi lebih dekat dan merata dikalangan masyarakat kecamatan Indrapuri”.

2. Misi

- 1) Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas adil dan tengkau dalam rangka meningkatkan taraf Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Indrapuri.
- 2) Melaksanakan dan mengembangkan sistem dan informasi yang akurat dalam pemenuhan kesejahteraan sosial sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- 3) Mendorong tersedianya infrastruktur yang menunjang dalam memberikan layanan.
- 4) Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung ditingkat kecamatan dengan pemanfaatan kesejahteraan sosial yang potensial.
- 5) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesejahteraan anggota/staf puspelkessos.

C. Struktur Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos) di Kecamatan Indrapuri.



Berdasarkan bagan di atas, sebagai pelaksana aparatur di Kantor Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos) adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Bustami. Ibr	Ketua
2	T.Raja Fadhlullah, SE	Sekretaris
3	Muliadi, ST	Bendahara
4	Dina Wirdanasari, A.Md.Kep	Ketua Divisi Database & Informasi
5	Wilda Safrah, S.Pd	Anggota
6	Danil Rahmat, S.Pd	Anggota
7	Mery Darusman	Anggota
8	Zia Muntazar, S.Sos	Ketua Divisi Pengembangan Kapasitas
9	Indra Saputra	Anggota
10	Muhammad Fauzi	Anggota
11	Mahdan	Anggota
12	Jakfar, S.Pdi	Ketua Divisi Pelayanan dan Rujukan
13	Munawir	Anggota
14	Junizar, A.Md	Anggota
15	Munawir	Anggota

(sumber: Data Puspelkessos Indrapuri)

D. Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos)

Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh Puspelkessos ialah sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya-upaya pelayanan kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan.
- b. Menggali potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat.
- c. Membangun kemitraan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Membangun mekanisme manajemen kasus penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

- e. Pengembangan pelayanan sistem informasi kesejahteraan sosial dengan melakukan pendataan PMKS, PSKS maupun kegiatan kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan.
- f. Dapat mengkoordinir kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial yang dilakukan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan tugas-tugas tersebut, maka fungsi puspelkessos adalah:

- a. Fungsi pencegahan, berfungsi untuk menghindarkan terjadinya berkembang dan terjadinya kembali suatu permasalahan kesejahteraan sosial.
- b. Fungsi pengembangan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, baik secara kelembagaan maupun pelayanan.
- c. Fungsi rehabilitas, memulihkan kondisi sosial psikologis PMKS.
- d. Fungsi penunjang, menjadi pendukung bagi kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pihak terkait.
- e. Fungsi promosi, mempromosikan usaha kesejahteraan sosial baik dalam konteks pencegahan, penggalangan dukungan dan jejaring maupun dalam konteks pengembangan sistem kesejahteraan sosial.
- f. Fungsi rujukan, memberikan rujukan untuk kebutuhan dan pelayanan kesejahteraan sosial ke jenjang lebih lanjut.
- g. Fungsi koordinator, Puspelkessos dapat menjadi coordinator atau pusat koordinasi pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

E. Sinergitas Kegiatan Puspelkessos Khususnya Kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Keberhasilan suatu proses dalam pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya kerjasama antara aparatur pemerintah dengan masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu. Karena secara prinsip pemberdayaan tersebut ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya suatu kegiatan tersebut tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Oleh karena itu kerjasama dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini untuk mencapai target pemberdayaan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah.

Kerjasama merupakan kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dalam hal ini fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah sebagai penghubung atau yang menjembatangi antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. Dan begitu juga Program Keluarga Harapan dimana suatu program yang dicetuskan oleh pemerintah sendiri yang bertujuan agar masyarakat mampu mengubah kehidupan menjadi lebih sejahtera, terutama bagi keberlangsungan hidup dimasa yang akan datang.

Masyarakat yang mengalami Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan mereka yang mengalami sendiri baik itu individu maupun kelompok. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau

keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Berikut ini merupakan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar:

NO	JENIS PMKS	SATUAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
			L	P	
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	Jiwa	15	22	37
2	Anak Terlantar (AT)	Jiwa	28	14	42
3	Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABDH)	Jiwa	3	0	3
4	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	Jiwa	34	35	69
5	Anak Korban Tindak Kekerasan (AKTK)	Jiwa	2	3	5
6	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	Jiwa	190	221	411
7	Penyandang Distabilitas (PD)	Jiwa	74	37	111
8	Pemulung	Jiwa	20	7	27
9	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP)	Jiwa	28	4	32
10	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	9	10	19
11	Fakir Miskin (FM)	Jiwa	-	-	2.481

(Sumber: Data Puspelkessos Indrapuri)

Bustami juga menjelaskan bahwa Anak yang Berhadapan Dengan hukum (ABDH) adalah anak-anak yang mengalami sebuah masalah namun mereka tidak ditahan karena mereka masih dibawah umur, sehingga dengan permasalahan yang di hadapi anak tersebut dalam hal ini membuat mental anak menjadi *down*. Adapun usia anak yang berhadapan dengan hukum antara 0 sampai dibawah 18 tahun. Anak Dengan Kecacatannya (ADK) di Kecamatan Indrapuri adalah dimana anak-anak mengalami kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau menghambat aktivitas sehari-hari dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara selayaknya, seperti: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta

penyandang cacat fisik dan mental (ganda), Anak cacat di kecamatan ini hampir seluruhnya tidak bersekolah tidak seperti anak normal lainnya, hal ini merupakan salah satu faktor ekonomi sebagai penghambat dalam pendidikan anak-anak cacat dikecamatan ini dan juga merupakan faktor keterbatasan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut dengan keterbatasannya. Adapun usia anak dengan kecacatannya adalah usia antar 0-18 tahun. Kehidupan para Lanjut Usia Terlantar (LUT) di Kecamatan Indrapuri adalah seseorang yang sudah berumur 60 tahun atau lebih, dimana para LUT ini mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosial, sehingga mereka tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, papan, pangan, dan kesehatan yang layak. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan untuk para LUT itu sendiri karena tidak dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sehari-hari secara baik. Para lanjut usia sangat mengharapkan pertolongan atau bantuan dari pemerintah setempat demi kelangsungan hidupnya.

Penyandang Disabilitas (PD) adalah individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual, meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Sedangkan Fakir Miskin (FM) adalah masyarakat yang tidak mampu mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam hal ini jumlah FM di Kecamatan Indrapuri secara keseluruhan mencapai 2.481 Jiwa. Adapun usia FM adalah usia sesudah menikah sampai dengan umur 59 tahun.³⁹

³⁹Hasil Wawancara dengan Pak Bustami (Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Tanggal 5 April 2019

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program pemberian bantuan sosial yang bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang diterapkan sebagai keluarga penerima manfaat dengan tujuan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Adapun tujuan dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada pokok masyarakat miskin. Peran pendamping PKH sendiri yaitu Mendampingi masyarakat yang menerima mamfaat bantuan PKH sebagai mana tujuan dari PKH itu sendiri serta membantu juga program dinas sosial lainnya yang diberikan melalui Puspelkesos. Di antaranya yaitu mendampingi Bantuan Untuk Ibu Hamil, Mendampingi bantuan untuk balita, Mendampingi Bantuan untuk anak didik usia sekolah SD, SMP, SMA, mendampingi Bantuan Untuk lansia, mendampingi bantuan untuk disabilitas, mendampingi membantu masyarakat yang tertimpa musibah, menanggapi segala pengaduan yang di alami oleh masyarakat.

Berbicara TKSK dan Pendamping PKH, ini merupakan dua bidang yang berbeda tugas dan fungsinya antara satu dengan yang lain tapi tujuannya sama yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan mereka saling bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat.

Ada beberapa kerjasama yang dilakukan TKSK dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Indrapuri di antaranya yaitu,

proses kerjasama dalam bimbingan atau pengarahan, kerjasama dalam pendataan dan kerjasama dalam pembantuan.

1. Kerjasama dalam Pendampingan atau Pengarahan

Kerjasama dalam hal pendampingan atau mengarahkan kepada masyarakat merupakan suatu proses sosial antara pendamping dengan klien (masyarakat) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Begitu juga peran TKSK dan Pendamping PKH, dimana saling bekerjasama dalam hal mendampingi masyarakat yang menerima manfaat bantuan serta membantu program dari Dinas Sosial melalui Puspelkessos. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bustami, beliau mengatakan bahwa:

“Realisasi peran TKSK sendiri misalnya seandainya anak fakir miskin menjumpai kita kadang kala mereka membutuhkan PKH maka kami arahkan ke pendamping PKH karena sekarang kita sudah mempunyai pendamping. misalnya masyarakat ingin membangun kios maka peran tskk yaitu menyusun buat proposal untuk di tunjukkan ke bupati kalau misalnya mereka tidak sanggup ke Jantho kami sendiri (TKSK) yang akan membawanya. jadi peran kami sebagai yang menjembatangi mereka bukan sebagai pengelola anggaran”⁴⁰

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kerjasama antara TKSK dan Pendamping PKH saling mendampingi antara satu dengan yang lain, dimana ketika masyarakat datang ketempat mereka dan mengadu permasalahan yang mereka dihadapi maka mereka langsung mengarahkan dan pendamping serta memberikan arahan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Pak Bustami (Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Tanggal 5 April 2019

2. Kerjasama dalam Pendataan

Kerjasama dalam pendataan merupakan salah satu hal yang sangat penting dimana data tersebut harus akurat dan jelas dalam pendataannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dani, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau kerjasama ada dalam hal pendataan, biasanya pihak TKSK meminta bantu sama kami dalam segi pendataan...tapi itu sebenarnya bukan tugas kami, kami disini saling membantu satu sama lain...kami mempunyai tugas sendiri tapi tujuannya sama yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial. Kalau dalam program sendiri kami tidak ada kerjasama karena kami berbeda bidang tapi sama-sama program dari dinas sosial. Ketika ada tugas di bidang bantuan sosial, dinas sosial memerintahkan kami untuk memfasilitasi data, data tersebut dikerjakan oleh puspelkessos di mana didalam nya terlibat TKSK, PKH, Dan TAGANA dimana kami saling bekerjasama terjun lapangan untuk melakukan pendataan. Misalnya Bantuan rumah dhuafa kami sama-sama mengecek orang yang berhak mendapatkannya”.*⁴¹

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kerjasama antara TKSK dan Pendamping PKH dalam hal pendataan mereka saling membantu satu sama lain, walaupun sebenarnya itu bukan tugas mereka karena mereka berbeda bidang antara satu dengan yang lain tapi tujuannya sama meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dan mereka terlibat langsung mulai dari pendataan hingga terjun lapangan bersama-sama untuk mengecek orang-orang yang berhak menerimanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dina Wirdanasari, beliau mengatakan bahwa:

“Kami bekerja semua untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan di kecamatan ini mempunyai 2500 data yang harus kami mengecek langsung apakah data tersebut akurat apa tidak, jadi pihak dinas sosial memberikan tugas ke kami (puspelkessos) bekerja semuanya untuk mendapatkan data yang akurat siapa saja yang berhak menerimanya dan hasil akan kami

⁴¹Hasil Wawancara dengan Pak Dani (Pedamping Keluarga Harapan), Tanggal 17 juni 2019

*serahkan ke dinas sosial. Disini kami membagi tugas satu orang memegang dapat 200 kpm untuk memvalidkan data tersebut”.*⁴²

Dalam hal ini pihak TKSK dan Pendamping PKH saling bekerjasama terjun lapangan untuk mengecek langsung data-data masyarakat secara akurat siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut dan mereka berbagi tugas satu sama lain untuk mendapatkan hasil data tersebut yang kemudian diserahkan ke dinas sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bustami, beliau mengatakan bahwa:

*“Sudah berjalan dengan semaksimal mungkin, walaupun dilapangan masih ada masyarakat yang sangat membutuhkan, akan tetapi mereka masih dalam proses usulan yang selalu di data tiap tahunnya, kenapa hal itu terjadi, karena kesediaan bantuan yang di berikan tidak sebanding dengan permintaan bantuan, jadi para pendamping selalu mengarahkan ketika ada pengaduan kepada masyarakat, agar tidak berpikir negatif, bersabar dan ketentuan Allah pasti ada, jika itu milik kita, dan Allah akan memberikan Untuk kita, semoga tahun selanjutnya ibu/bapak bisa menerimanya”*⁴³.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peran mereka sendiri sudah berjalan dengan semestinya, walaupun dalam realita masih banyak kendala yang dihadapi oleh TKSK dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat. Dimana salah satu kendala yang mereka hadapi diantaranya kurangnya persediaan bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial tak sebanding dengan permintaan bantuan tersebut, sehingga pedamping tersebut memberikan motivasi kepada masyarakat.

⁴²Hasil Wawancara dengan Ibu Dina Wirdanasari (Pedamping Keluarga Harapan), Tanggal 17 juni 2019

⁴³Hasil Wawancara dengan Pak Bustami (Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Tanggal 5 April 2019

3. Kerjasama dalam Pembantuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ernita, beliau mengatakan bahwa kerja sama antara TKSK dan Pendamping PKH dalam hal pembantuan, di mana ketika ada bantuan dari Dinas Sosial baik itu berupa rumah dhuafa, bantuan modal dan lain-lain sebagainya, TKSK dan Pendamping PKH saling berkoordinasi dalam mengecek langsung apakah masyarakat tersebut layak menerima bantuannya.

“Kerjasama Pendamping PKH dan TKSK dibidang pembantuan kepada masyarakat yang di berikan oleh dinas sosial. Misalnya dinas sosial memberikan rumah dhuafa kepada salah satu masyarakat. Jadi TKSK dan pendamping PKH saling koordinasi apakah masyarakat tersebut layak menerima atau tidak. Begitu juga bantuan yang diberikan dinas sosial misalnya bantu modal, usaha ternak dll. jadi kami saling koordinasi satu sama lain”.⁴⁴

Dari penjelasan di atas dapat dilihat, bahwa TKSK dan Pendamping PKH saling membantu dan mengkoordinasi satu sama lain dengan mendata masyarakat siapa saja yang berhak menerima bantuan dari Dinas Sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bustami, beliau mengatakan bahwa:

“kami saling berkomunikasi antar tenaga/ pendamping lain dengan cara wa menanyakan ada keluhan dan masalah apa dengan masyarakat ... Pendamping PKH hanya mendampingi hanya satu program saja yaitu PKH sedangkan TKSK melaksanakan. Dan komunikasi kami sangat intens karena apa saja yang di adukan oleh masyarakat kami dengan segera mencari solusi. Selain itu, cara koordinasi kami antara TKSK dan Pendamping PKH adalah dengan rapat”.⁴⁵

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Ernita (Pedamping Keluarga Harapan), Tanggal 17 juni 2019

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Pak Bustami (Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Tanggal 5 April 2019

Dari jawaban diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara TKSK dan Pendamping PKH selama ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari komunikasi yang intens antara pedamping satu dengan yang lain melalui grup WA. Dan bentuk koordinasi antara TKSK dan Pendamping PKH yaitu dengan cara rapat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Efendi, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap ada kegiatan kami selalu dikasih tahu,dan disampaikan kekita bahwa segini jumlah wilayah kita dll, dan biasanya mereka melapor terlebih dahulu ke kita kegiatan apa saja yg dikerjakan, mereka tidak pernah melupakan rajanya di daerah. Pertama mereka (TKSK dan Pendamping PKH datang kesaya) memberitahu kegiatan apa yang mau dibuat, setelah itu camat kasih tahu ke masyarakat, nanti setelah kita sama-sama tau program atau kegiatan tersebut baru di jalankan kegiatan tersebut. misalnya minggu lalu pembagian beras miskin orang dinas menyampaikan ke kita, kita menyampaikan lagi ke masyarakat disana kami berkumpul dan pak keuchik di minta hadir dan beberapa orang untuk dijadikan saksi ,makanya semua hadir biar gak terjadi praduga dan permasalahan di kemudian hari...kalau tidak di buat seperti ini maka akan timbul di masyarakat dari mana bantuan tersebut ?, kenapa tidak ada transparansi ? maka dari itu agar tidak timbul permasalahan tersebut makanya kami bawa saksi”⁴⁶

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat, bahwa selama ini komunikasi antara TKSK dan Pendamping PKH sudah berjalan dengan baik, di mana setiap kegiatan yang dijalankan baik itu pihak TKSK dan Pendamping PKH selalu meminta persetujuan terlebih dahulu dari camat. Apabila camat mengiyakan maka kegiatan tersebut akan segera dilaksanakan. Begitu juga dengan kolaborasi antara Camat, TKSK, Pendamping PKH dan Masyarakat selama ini sudah berjalan dengan semestinya. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan di beri tau kepada

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Pak Efendi (Camat Indrapuri), Tanggal 5 April 2019

masyarakat terlebih dahulu supaya transparansi di kemudian hari sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Julian, jawabannya hampir sama dengan hasil wawancara dengan Keuchik Junaidi, dimana beliau mengatakan:

*“Selama ini pendamping PKH sering mengunjungi masyarakat untuk mengsosialisasikan kegiatan yang mereka kerjakan, setidaknya sebulan sekali mereka terjun lapangan untuk melakukan pendataan, membuat pertemuan dan lain-lain sebagainya dan biasanya sebulan sekali mereka terjun. Tapi kalau TKSK sendiri kalau kita ajukan proposal / usulan mungkin orang tersebut akan terjun ke lapangan tergantung usulan tersebut di terima apa tidak. biasanya bantuan TKSK tersebut biasaya untuk keluarga lansia, strok dll itu pun tergantung apakah usulan tersebut di terima atau tidak”.*⁴⁷

Jadi dapat diketahui bahwa selama ini kegiatan yang dilakukan oleh pendamping PKH berjalan dengan baik, dimana pendamping PKH sudah mengsosialisasikan kegiatan apa saja yang mereka lakukan/kerjakan. Dan biasanya pendamping PKH sebulan sekali terjun lapangan untuk melakukan pendataan. Tetapi berbeda dengan TKSK, di mana mereka kurang terjun lapangan. Sementara itu, menurut Keuchik Rafiki, beliau mengatakan:

*“Dan sejauh ini saya lihat dalam kegiatan Pendamping PKH masih berjalan sampai saat ini, TKSK tidak terlalu banyak kegiatannya tergantung kita ajukan proposal. Kalau masalah kerjasama mereka kerjasama satu kantor. Dan pendamping PKH kalau ada bantuan mereka terjun sendiri ke lapangan. Dan biasanya mereka ketika terjun ke lapangan dulu dengan saya kalau mereka ingin terjun ke lapangan. Jadi saya akan kasih tau ke masyarakat bahwa mereka akan terjun ke lapangan”.*⁴⁸

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Pak Julia dan Pak Junaidi (Keuchik Limo Blang & Keuchik Lampupok), Tanggal 5 April 2019

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Pak Rafiki (Keuchik Gampong Indrapuri), Tanggal 5 April 2019

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa sejauh ini kegiatan yang dilakukan oleh Pendamping PKH sudah berjalan dengan semestinya. Sedangkan TKSK tidak terlalu banyak kegiatannya tergantung masyarakat mengajukan proposal kepada mereka (TKSK). dan komunikasi antara Pendamping PKH dengan keuchik juga intens. Kemudian Berdasarkan hasil wawancara dengan Syamsidar jawabannya hampir sama dengan hasil wawancara dengan Darmiyati, dimana beliau mengatakan:

*“Beliau juga menjelaskan bahwa selama ini saya belum pernah mendengar apa itu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), bagaimana peran atau cara mereka bekerja saya tidak tahu. jadi saya tidak tau bagaimana peran mereka sendiri dalam bekerja di setiap gampong khususnya di gampong saya. Sedangkan pendamping PKH saya tau, mereka sering turun lapangan dan memberikan bantuan khusus buat Anak-anak. dan kami sering bilang (peng aneuk mit) dan menurut saya peran mereka saat ini sangat bagus karena membantu kami yang masyarakat miskin, yang dulunya baju sekolah anak-anak compang camping alhamdulillah sekarang sudah bagus dan baru semua berkat dari uang itu jadi sangat bermanfaat sekali buat anak-anak”.*⁴⁹

Sementara itu, hasil wawancara dengan Yusra beliau mengatakan:

*“Bahwa sampai saat ini kondisi Ekonomi masyarakat di gampong belum mengalami perubahan kearah yang lebih baik setelah mendapat Uang PKH tersebut. mungkin ada sebagian masyarakat menggunakan uang tersebut buat modal usaha misalnya membuat kue untuk di tarok di kedai/warung dan ada sebagian masyarakat lagi menghambur-hamburkan uang dengan belanja ini itu sehingga uang yang di kasih itu mereka tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga masyarakat ya seperti gini-gini aja belum ada perubahan sama sekali”.*⁵⁰

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, selama ini masyarakat sendiri tidak tau apa itu TKSK, bagaimana peran mereka dalam bekerja dan lain-

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Syamsidar & Ibu Darmiyati (Masyarakat Penerima Manfaat), Tanggal 8 April 2019

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Yusra (Masyarakat Penerima Manfaat), Tanggal 8 April 2019

lain sebagainya. Dan masyarakat lebih mengenal PKH karena pendamping PKH sering mengsosialisasikan kegiatan mereka dan mereka sering terjun lapangan dengan memberi bantuan kepada masyarakat. Dan kondisi masyarakat yang menerima bantuan tersebut masih belum mengalami perubahan kearah yang lebih baik, dimana kita lihat masih banyak masyarakat menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya. Sehingga dengan bantuan tersebut masyarakat tidak memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarga.

Berdasarkan hasil yang Peneliti dapatkan dilapangan bahwa selama ini ketika masyarakat menerima bantuan atau pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat mereka tidak melihat kegiatan tersebut dilakukan oleh TKSK atau Pendamping PKH yang penting mereka menerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Adnan, beliau mengatakan bahwa:

*“Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum menjalankan perannya dan sangat jarang memantau kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh dinas sosial lebih-lebih kegiatan yang di gampong-gampong sangat jarang”.*⁵¹

Sementara itu menurut Zulfikar beliau mengatakan:

*“Kondisi ekonomi masyarakat di kecamatan Indrapuri sama saja tidak adanya perubahan baik itu setelah mendapat bimbingan dari Tanaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun belum. Mengingat masih banyaknya jumlah fakir miskin dan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di gampong-gampong”.*⁵²

⁵¹Hasil Wawancara dengan Bapak Adnan (Masyarakat Penerima Manfaat), Tanggal 8 April 2019

⁵²Hasil Wawancara dengan Bapak Zulfikar (Masyarakat Penerima Manfaat), Tanggal 8 April 2019

Dari hasil jawaban di atas dapat diketahui bahwa peran TKSK sendiri maksimal dalam menjalankan tugasnya, di mana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaannya. Bahkan program atau kegiatan TKSK sendiri belum ada perubahan kearah yang lebih baik. Sementara itu menurut Bustami, beliau mengatakan:

*“Mungkin keterbatasan bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan para TKSK karena berkaitan dengan keterbatasan orang dan waktu yang dimiliki Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Dimana Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di kecamatan indrapuri hanyalah satu orang. Sehingga kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan sosial guna mengatasi masalah kemiskinan di Kecamatan indrapuri belum terealisasi dengan benar kesetiap gampong-gampong yang ada di indrapuri, mengingat kecamatan indrapuri ini sangat luas jangkauannya”.*⁵³

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keterbatasan bimbingan, sosialisasi, penyuluhan yang diberikan TKSK dikarenakan keterbatasan orang dan waktu yang dimiliki TKSK itu sendiri dikarenakan petugasnya hanya satu orang. Sehingga semua kegiatan yang dilakukan TKSK belum terealisasi dengan baik mengingat jangkau Kecamatan Indrapuri ini sangat luas jengkaunnya yang terdiri dari 52 gampong.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat

Terdapat beberapa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan Sinergitas kegiatan Puspelkessos khususnya kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam Pembedayaan Masyarakat, sebagaimana akan penulis uraikan dibawah ini.

⁵³Hasil Wawancara dengan Pak Bustami (Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Tanggal 5 April 2019

1. Faktor Pendukung

Setiap program sudah tentu mempunyai faktor yang melatarbelakangi timbulnya program/kegiatan tersebut dan setiap yang sudah diprogramkan tentunya mempunyai faktor pendukung jalannya program tersebut. Begitu pula halnya dengan program yang dialami oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun faktor pendukungnya adalah:

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping PKH di Kecamatan Indrapuri telah mendapatkan fasilitas yaitu memiliki komputer yang di berikan dinas untuk menampung semua aspirasi yang dan mencatat program kerja selama sebulan sekali serta memberikan laporan dari hasil kerjanya, alat komunikasi (HP) sehingga sangat memudahkan para petugas tersebut dalam menjalankan proses komunikasi antar petugas satu sama lain dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Dan bukan cuma itu fasilitas yang di miliki oleh TKSK dan Pendamping PKH adalah mempunyai lembaga (kantor) untuk melakukan rapat atau musyawarah untuk mengatasi atau mencari solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bustami bahwa:

“Alat komunikasi seperti hp, jadi setiap ada masalah kami langsung menghubunginya melalui Grup WA walaupun bukan jam dinas. Dan kami juga mempunyai lembaga untuk musyawarah (rumah dinas camat yang dulu seakrang menjadi kantor kami yaitu puspelkessos)”.⁵⁴

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Pak Bustami (Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Tanggal 5 April 2019

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa cara berkomunikasi antara TKSK dan Pendamping PKH melalui Grup WA untuk mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat. Dan mereka juga mempunyai lembaga untuk bermusyawarah yaitu sebuah kantor yang diberi nama Puspelkessos.

b. Partisipasi Masyarakat

Adapun faktor pendukung TKSK dan Pendamping PKH adalah partisipasi masyarakat, di mana masyarakat sendiri sudah ikut berpartisipasi dalam hal memberi informasi tentang apa saja masalah yang di hadapi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bustami bahwa:

“Masyarakat telah memberikan informasi kepada kami (TKSK dan Pendamping PKH) apa saja kendala yang di hadapinya. Sehingga kami disini memberikan arahan dan pengertian dari masing-masing peran kami ini”.⁵⁵

- c. Saling berkoordinasi dalam menyelesaikan laporan baik secara administrasi maupun saling memfasilitasi pada kegiatan di lapangan.
- d. Adanya pendampingan secara rutin yang dilakukan oleh Pendamping PKH.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang dialami oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat adalah:

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Pak Bustami (Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Tanggal 5 April 2019

- a. Tidak memiliki kendaraan yang cukup, khususnya pendamping PKH sehingga para pendamping kebanyakan menggunakan kendaraan keluarga, jika ada tugas mendadak terkadang terpaksa meminjam kendaraan tetangga.
- b. Tidak ada laptop yang di berikan kepada khususnya pendamping PKH disetiap melakukan pendampingan, sehingga laporan yang sudah di selesaikan oleh salah satu pendamping tidak bisa di berikan ke pendamping lainnya, artinya tidak bisa langsung memberikan pengalaman tertulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian, serta pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai Sinergitas Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial mengenai kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dilakukan TKSK dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Indrapuri selama ini saling bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain, mulai terlihat dari proses kerjasama dalam bimbingan atau pengarahan, Kerjasama dalam Pendataan dan kerjasama dalam Pembantuan. Berbicara TKSK dan Pendamping PKH, ini merupakan dua bidang yang berbeda tugas dan fungsinya antara satu dengan yang lain tapi tujuannya sama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan mereka saling bekerjasama dalam hal pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Indrapuri.
2. Adapun faktor pendukung Sinergitas kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Indrapuri adalah:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping PKH di Kecamatan Indrapuri telah mendapatkan fasilitas yaitu memiliki komputer yang di berikan dinas untuk menampung semua

aspirasi dan mencatat program kerja selama sebulan sekali, memiliki alat komunikasi (HP) sehingga sangat memudahkan para petugas tersebut dalam menjalankan proses komunikasi antar petugas satu dengan yang lain, dan memiliki Lembaga (kantor) yang digunakan untuk rapat atau musyawarah untuk mengatasi atau mencari solusi dalam permasalahan yang di hadapi.

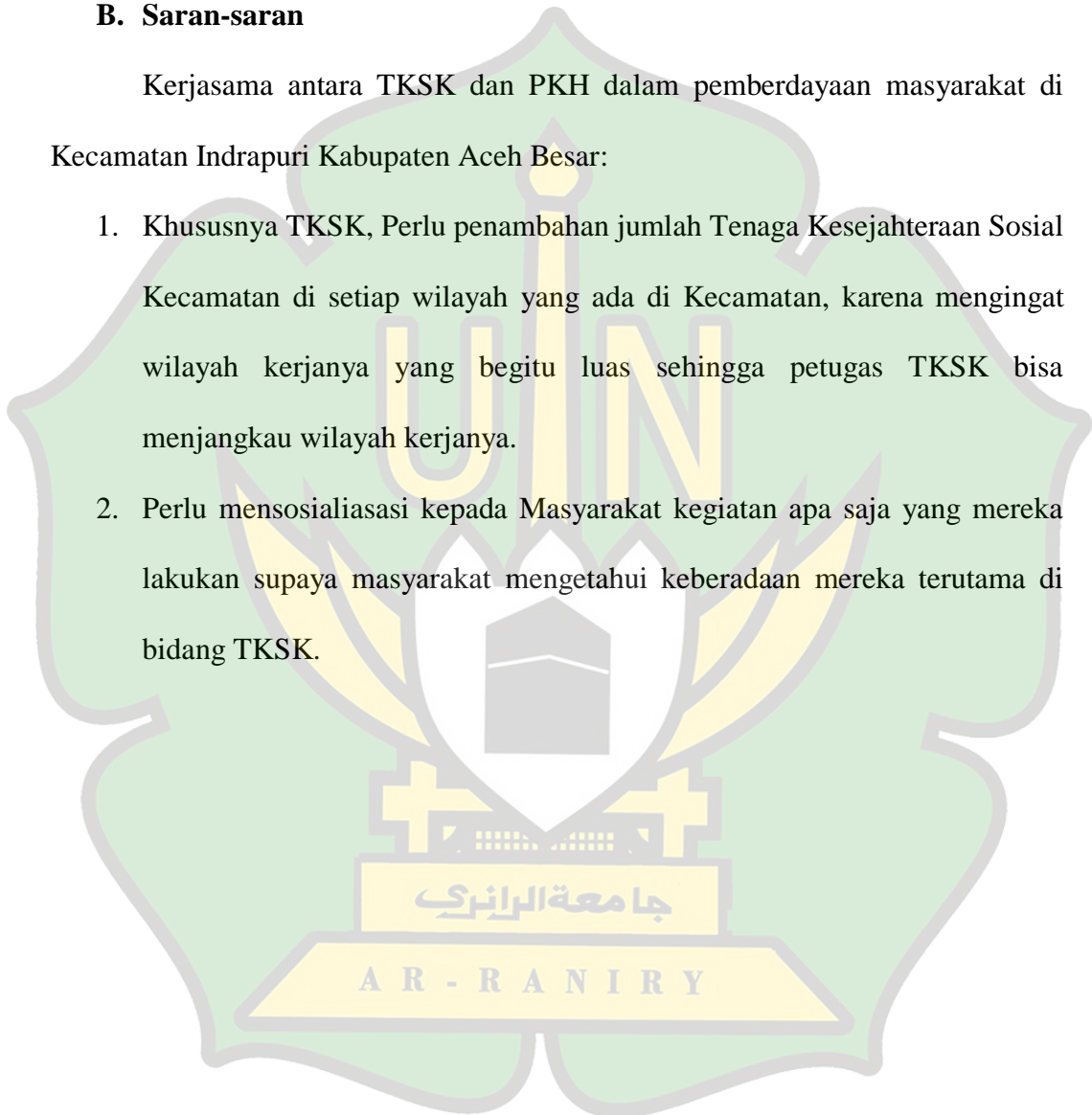
- b. Masyarakat sendiri sudah ikut berpartisipasi dalam hal memberi informasi tentang apa saja masalah yang di hadapi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.
 - c. Saling berkoordinasi dalam menyelesaikan laporan baik secara administrasi maupun saling memfasilitasi pada kegiatan di lapangan.
 - d. Adanya pendampingan secara rutin yang dilakukan oleh Pendamping PKH.
3. Adapun faktor penghambat Sinergitas kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Indrapuri adalah:
- a. Tidak memiliki kendaraan yang cukup, khususnya pendamping PKH sehingga para pendamping kebanyakan menggunakan kendaraan keluarga, jika ada tugas mendadak terkadang terpaksa meminjam kendaraan tetangga.
 - b. Tidak ada laptop yang di berikan kepada khususnya pendamping PKH disetiap melakukan pendampingan, sehingga laporan yang

sudah di selesaikan oleh salah satu pendamping tidak bisa di berikan ke pendamping lainnya, artinya tidak bisa langsung memberikan pengalaman tertulis.

B. Saran-saran

Kerjasama antara TKSK dan PKH dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar:

1. Khususnya TKSK, Perlu penambahan jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di setiap wilayah yang ada di Kecamatan, karena mengingat wilayah kerjanya yang begitu luas sehingga petugas TKSK bisa menjangkau wilayah kerjanya.
2. Perlu mensosialisasi kepada Masyarakat kegiatan apa saja yang mereka lakukan supaya masyarakat mengetahui keberadaan mereka terutama di bidang TKSK.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdulsyani, 1994. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edi Santoso dan Mite Setiansah. 2012. *Teori Komunikasi*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Hadawi Nawawi. 1984. *Adminitrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Moleong, Lexi J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roesdakarya.
- Nawawi, Hadawi. 1984. *Adminitrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Rukminto, Isbandi Adi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Ed I. Jakarta: Rajawali.
- Santoso, Edi dan Mite Setiansah, 2012. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Sony, Toman Tambunan, 2016 *Glosarium Istilah Pemerintah*, Jakarta: Kencana.
- Sugiono. 1999. *Metodologi Penelitian BISNIS*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Cet, 1. Bandung: Alfabeta.
- Suud, Mohammad. 2006. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Syaodih, Nana Sukadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sumber Jurnal atau Skripsi

Akbar Pandu Dwinugraha, *Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jurnal Publisia (Jurnal Administrasi Negara), Vol.1, No. 2 Tahun 2016. Diakses pada tanggal 19 Juli 2019.

Andi Nu Graha, *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi*, *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 5, No. 2, 2009. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2019.

Fakhrudin, *Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Fakultas Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas UIN AR-Raniry.

Irwanda, M. Firmansyah, *Sinergitas Kewenangan Antar BPJS Kesehatan Dengan Organisasi Profesi Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan, kebijakan dan manajemen publik*, Vol. 4, No. 2, Mei-Agustus 2016.

M. Irwanda Firmansyah, *Sinergitas Kewenangan Antar BPJS Kesehatan Dengan Organisasi Profesi Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan, kebijakan dan manajemen publik*, Vol. 4, No. 2, Mei-Agustus 2016. Diakses pada tanggal 29 maret 2019.

Machali, Imam, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal PMI Media Pemikiran dan Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), Vol. VI, No. 2.

Mizan, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas UIN AR-Raniry.

Noviana Wahyu Prabandary, *Koordinasi Antar Instansi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur*. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

Hidayat, Nurul, *Pendampingan Untuk Menghidupkan Keberlangsungan Petani Karet Di Desa Sungai Kuyit*, UIN Sunan Ampel. 2015 ([www://https digilib.uinsby.ac.id/2104/5/bab 2 Pdf](http://www.digilib.uinsby.ac.id/2104/5/bab%202%20Pdf)). Diakses pada tanggal 22Juli 2019.

Rahayu, Diyah Pratiwi, *Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelah Maret. Surakarta.2015.

Saridah, *Strategi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Janda Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan Trumon*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas UIN AR-Raniry.

Sri Najiyati dan Slamet Rahmat Topo Susilo, *Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri*, *Jurnal Ketransmigrasian*, Vol. 28, No. 2, 2011. Diakses pada tanggal 19 Maret 2019.

Wahyu, Noviana Prabandary, *Koordinasi Antar Instansi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur*. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

Hidayatulah Himawan, *Efektifitas Tata Kerja Pendataan Kepegawaian Dalam Mewujudkan Good Governance*. *Seminar Nasional Informatika*, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2019.

Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi

Dinas Sosial Aceh, *Panduan Puspelkessos*, 2013.

Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Panduan TKSK*, Banda Aceh, Dinas Sosial Aceh, 2008.

Kajian Program Keluarga Harapan, oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Tahun 2015.

PKH Aceh Besar. Diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Sumber Surat Kabar/Majalah

<http://aceh.tribunnews.com/2015/08/13/pengurus-puspelkessos-se-banda-aceh-dikukuh>.

<http://acehnetwork.com/berita1/Pusat-Pelayanan-Kesejahteraan-Sosial-Aceh-Dinilai-Cukup-Baik-29232>.

<https://dinsos.acehprov.go.id/index.php/page/26/puspelkessos>.

<https://www.kemsos.go.id/Program-keluarha-Harapan>.

Kementerian Sosial RI. 2009. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2009. (<http://www.depsoso.go.id>).

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 97/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Sabirin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Sri Maulidar
NIM : 150802018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Sinergitas Kegiatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

An: Rektor
Dekan,


Errita Dewi



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negeri;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-793/Un.08/FISIP/PP.00.9/4/2019
Lampiran :-
Hal : Permohonan Izin Penelitian

02 April 2019

Kepada Yth,
Kepala Dinas Sosial Aceh Besar
di -

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami untuk melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Sri Maulidar
NIM : 150802018
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Sinergitas Kegiatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puskessos) Studi Kasus Kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar.
Lokasi Penelitian : Puspelkessos Indrapuri Aceh Besar

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

AR - R



Dekan,

Ernita Dewi



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS SOSIAL

Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH E-mail : Dinsos.abes@gmail.com Telp. (0651) 92024 Fax. (0651) 92045 Kota Jantho 23911

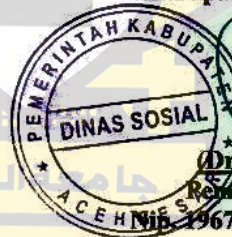
Nomor : 460/ *RA*
Lampiran : -
Sifat
Perihal : **Permohonan Izin**

Kota Jantho, 17 Juni 2019
Kepada Yth.
Pulpelkeso Indapuri
di -

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat UIN Ar-Raniry Nomor: B-793/Un.08/FISIP/PP.00.9/4/2019 Tanggal 02 April 2019 Perihal Permohonan izin Penelitian.
2. Maka kami dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar tidak menaruh keberatan dan memberi izin kepada saudara Sri Maulidar, Nim : 150802018 untuk mengambil data Umum yang ada di Aceh Besar.
3. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Aceh Besar



(*Dr. Rusdi*)
Rimbina (IV/a)

Nip. 196702191994031014

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS SOSIAL

Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH E-mail : Dinsos.abes@gmail.com Telp. (0651) 92024 Fax. (0651) 92045 Kota Jantho 23911

Nomor : 460/ 023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Telah Melakukan Penelitian
di Pulpekessos Indrapuri-----

Kota Jantho, 02 Juli 2019
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan melakukan Penelitian di Pulpekessos Indrapuri, pihak kami Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa:

Nama : Sri Maulidar

NIM : 150802018

Jurusan/Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Yang tersebut diatas telah melakukan pengambilan data di Pulpekessos Indrapuri yang bertujuan untuk menyelesaikan Tugas akhir perkuliahan, degan judul Sinergitas Kegiatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten aceh Besar).

2. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Aceh Besar

Ir. Cut Sufriawaty
Pemoma (IV/a)

Nip. 19641008 199803 2 002

No.05/ND/2019.Tanggal 02 Juli 2019

AR-RANIRY

Intrumen Wawancara

Daftar Pertanyaan : untuk TKSK dan Pendamping PKH

1. Bagaimana peran TKSK dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana realisasi peran tersebut?
3. Apa saja yang menjadi landasan hukum TKSK dan Pendamping PKH dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
4. Program-program apa saja yang menjadi focus TKSK dan Pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?
5. Apakah program tersebut sudah berjalan dengan semestinya?
6. Bagaimana bentuk atau cara koordinasi TKSK dan Pendamping PKH di kecamatan ini?
7. Bagaimana intensitas koordinasi yang dilakukan TKSK atau Pendamping PKH tersebut?
8. Pada taraf perencanaan maupun pelaksanaan upaya apa saja yang dilakukan oleh TKSK / pendamping PKH apabila terjadi overlepping (tumpang tindih)?
9. Apa saja kendala yang dihadapi TKSK / Pendamping PKH dalam koordinasi tersebut?
10. Salah satu strategi dalam pemberdayaan adalah dengan cara sinergitas kebijakan dan program, upaya apa saja yang dilakukan TKSK dan Pendamping PKH untuk mensinergikan kebijakan / program tersebut?
11. Apa saja faktor pendukung sinergitas TKSK dan Pendamping PKH dalam mensinergikan program tersebut?
12. Apa saja kendala yang dihadapi TKSK dan Pendamping PKH dalam mensinergikan program tersebut?
13. Bagaimana upaya untuk menghadapi kendala tersebut?

CAMAT

1. Sejauh ini bagaimana kegiatan TKSK dan Pendamping PKH dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ?
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan TKSK dan Pendamping PKH?
3. Apakah kegiatan tersebut masih berlangsung saat ini?
4. Apakah TKSK dan Pendamping PKH saling bekerjasama dalam kegiatan tersebut?
5. Faktor apa yang menghambat serta mendukung kegiatan tersebut?
6. Bagaimana upaya / solusi untuk menghadapi kendala tersebut?
7. Bagaimana komunikasi TKSK dan Pendamping PKH dgn Camat?
8. Bagaimana kerjasama dan kolaborasinya antara TKSK, Pendamping PKH dengan Camat?

KEUCHIK

1. Bagaimana peran TKSK dan Pendamping PKH sendiri dikampung ini dalam pemberdayaan masyarakat?
2. Apakah peran tersebut masih berjalan sampai saat ini?
3. Selama ini kegiatan apa saja yang dilakukan TKSK dan Pendamping PKH dikampung ini?
4. Apakah kegiatan tersebut berdampak baik kedepannya?
5. Biasanya bantuan apa saja yg diberikan baik itu TKSK dan Pendamping PKH?
6. Berapa banyak masyarakat yg menerima bantuan tersebut?,apakah bantuan tersebut masih berjalan sampai saat ini?
7. Selama ini apakah para TKSK dan Pendamping PKH saling bekerjasama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?
8. Faktor apa saja yg mendukung dan menghambat sinergitas tersebut d kampung bapak?
9. Upaya apa saja yang dilakukan baik itu TKSK dan Pendamping PKH dalam bekerjasama di kegiatan tersebut?
10. Bagaimana komunikasi TKSK dan Pendamping PKH dengan Keuchik?
11. Bagaimana kerjasama dan kolaborasinya antara TKSK, Pendamping PKH dengan Keuchik?

MASYARAKAT

1. Sebelumnya ibu/bapak apakah pernah mendengar apa TKSK dan Pendamping PKH?
2. Sejauh ini apa saja yang ibu ketahui mengenai TKSK dan Pendamping PKH?
3. Apakah ibu sebelumnya mengetahui peran dan tugas dari TKSK dan Pendamping PKH?
4. Apakah peran/tugas yg ibu sampaikan tadi dapat menangani masalah kemiskinan dikecamatan ini?
5. Sejauh ini apa saja kegiatan yg dilakukan oleh TKSK dan Pendamping PKH?
6. Apakah sudah berjalan kegiatan tersebut?
7. Bagaimana kondisi masyarakat saat ini apakah sama saja atau sudah perubahan setelah menjalankan kegiatan tersebut?
8. Menurut bapak/ibu apakah para pekerja sosial ini sudah mampu menjalankan tugas mereka dalam menangani masalah kemiskinan di kecamatan ini?
9. Selama ini modal usaha apa saja yang diberika oleh TKSK dan Pendamping PKH?
10. Menurut bapak,apakah para pekerja sosial saling bekerjasama dalam menjalankan tugas yang diembankan sama mereka?
11. Bagaimana komunikasi TKSK, Pendamping PKH dengan masyarakat?

DOKUMENTASI



Penyerahan surat izin penelitian dari dinas sosial kepada Kantor Puspelkessos Kecamatan Indrapuri yang diwakili oleh Bapak Bustami



Wawancara dengan Bapak Bustami (TKSK Indrapuri)



Wawancara dengan Bapak Efendi (Camat Indrapuri)



Wawancara dengan salah satu Keuchik, Bapak Julia (Keuchik Gp.Limo Blang)



**Wawancara dengan
Masyarakat (Ibu Syamsidar)**



**Wawancara dengan
Pendamping PKH (Bapak
Danil Rahmat)**

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Sri Maulidar
Tempat/ Tanggal Lahir : Limo Mesjid, 29 agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Belum Kawin
Alamat : Limo Blang, Kec. Indrapuri, Kab.Aceh Besar
No.Hp : 082361402875
Email : srimaulidar2908@gmail.com

Nama Orang Tua

a. Ayah : Raden Zikri
b. Pekerjaan : Petani
c. Ibu : Ruslina
d. Pekerjaan : Petani
e. Alamat : Limo Blang, Kec. Indrapuri, Kab.Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

a. MIN : MIN Indrapuri
b. MTsN : MTsN Indrapuri
c. MAN : MAN Sibreh
d. Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/
Ilmu Administrasi Negara

Banda Aceh, 15 Juli 2019
Yang menerangkan,

Sri Maulidar